

**KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK MENJELANG
PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007**



SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana



16-5-07
Fak. Gospol
1 cke
Hadical
257
SKR-507
LES
k.

Disusun dan diajukan oleh

SALAHUDIN LESSY

E 111 03 025

Kepada

**PROGRAM STUDI ILMU POLITIK
JURUSAN ILMU POLITIK PEMERINTAHAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS HASANUDIN
MAKASSAR**

2007



*dipersembahkan buat maniku Siti Hadija Sangadji
dan sang bauh hati Muhammad Akbar Lessy*

HALAMAN PENGESAHAN

Judul Skripsi : **Kekuatan-kekuatan Politik Menjelang Pemilihan Gubernur
Sulawesi Selatan Tahun 2007**

Nama : **Salahudin Lessy**

NIM : **E 111 03 025**

Program Studi : **Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Politik Pemerintahan**

Makassar, 13 Agustus 2007

Menyetujui,

Konsultan I

Konsultan II

YMS

Drs. Muhammad Saad, MA
NIP 131 453 871

[Signature]
Drs. H. A. Yakub, M.Si
NIP 131 907 682

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Hasanuddin

[Signature]
Dr. Armin Assyad, M.Si
NIP 131 961 985



HALAMAN PENERIMAAN

Judul Skripsi : **Kekuatan-kekuatan Politik Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007**

Nama : **Salahudin Lessy**

NIM : **E 111 03 025**

Program Studi : **Ilmu Politik**

Jurusan : **Ilmu Politik Pemerintahan**

Telah diperiksa dan disahkan oleh Panitia Ujian Sarjana Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar dan memenuhi syarat untuk memperoleh **Gelar Sarjana (S1)** pada Program Studi Ilmu Politik.

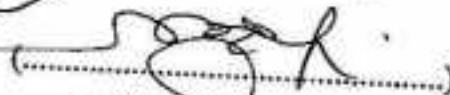
Makassar, 13 Agustus 2007

Panitia Ujian :

Ketua : **Dr. M. Kausar Bailusy, MA**


(.....)

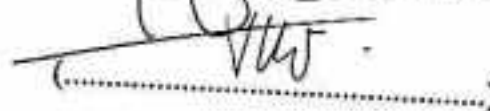
Sekretaris : **Andi Naharuddin, SIP, M.Si**


(.....)

Anggota : **1. Dr. Armin Arsyad, M.Si**


(.....)

2. Drs. Muhammad Saad, MA


(.....)

3. Drs. H. Andi Yakub, M.Si


(.....)

KATA PENGANTAR

Salam perjuangan, Semoga dipanjangkan usia zaman dalam selamat, sejahtera dan sentosa. Dan semoga kita semua dirantingkan dalam pohon manusia yang selalu istiqomah dalam mengabarkan kebenaran kepada semua yang tak jelas berkata. Demi tong pediri, tong daerah, dan tong masyarakat.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada mereka yang telah membantu hingga penyelesaian skripsi ini, mereka yang telah membantu selama bermahasiswa hingga sarjana, dan terutama mereka yang berdialektika sehingga penulis mencapai tingkat kesadaran seperti sekarang ini.

1. Ayahanda Abdullatif Lessy dan Ibunda Damra Ismail serta mertuaku Ayahanda Kahar Sangadji dan Ibunda Djaima Hi. Murid yang hingga kini masih terus memberikan doa dan kasih sayangnya, juga Kakanda Awaluddin Lessy dan Adinda Samsul Bahri Lessy yang selalu memberikan semangat dalam setiap kesempatan.
2. Istriku tercinta **Siti Hadija Sangadji** dan Sang buah hati calon revolusioner sejati The New Prins Rebel **Muhammad Akbar Lessy**, skripsi ini dipersembahkan untuk kalian.
3. Bapak Dr. M. Kausar Bailusy, MA selaku Pudek I, Bapak Dr. Armin Arsyad, M.Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Politik Pemerintahan, Bapak Drs. Muhammad Saad, MA selaku Konsultan I, Bapak Drs. H. Andi

Yakub, M.Si selaku Konsultan II, dan seluruh staf pengajar serta staf akademik yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, terimakasih atas bantuannya selama ini.

4. Kawan-kawan Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik (HIMAPOL) Fisip Unhas, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, Bersama, Bersatu, Berjaya.
5. Kawan-kawan Himpunan Pelajar Mahasiswa Indonesia Nuku (HIPMIN) Makassar, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, tetap pertahankan semangat juang Nuku.
6. Kawan-kawan Himpunan Pelajar Mahasiswa Halmahera Timur (HPMHT) Makassar, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, tetap tolak tambang choi.
7. Kawan-kawan Unit Kegiatan Pers Mahasiswa (UKPM) Unhas/Front Aksi Mahasiswa (FAM) Unhas/IdeFIX, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, panjang umur anarkisme, tetap aksi choi.
8. Spesial buat sodara-sodara seperguruan : Irfan Karim/Valen, M. Hafidz Ismail, SIP/Pito, Gunawan Lestari Elake, SIP/Goen Gie, Ir. Iswandi Muhammad/Pitong, terimakasih atas kebersamaan kita selama ini, maka dipohonkan usia zaman moga-moga kita berjumpa lagi.

Makassar, 15 Agustus 2007

Penulis,

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pengesahan.....	ii
Kata Pengantar.....	iii
Daftar isi.....	iv
Abstrak.....	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	10
D. Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kekuatan Politik.....	11
1. Partai Politik.....	11
2. Kelompok Kepentingan.....	22
3. Kelompok Penekan.....	27
B. Teori Pertukaran Jaringan dan Teori Pilihan Rasional	29
C. Konflik Politik.....	32
D. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung.....	43

BAB III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian.....	50
B. Lokasi Penelitian.....	50
C. Sumber Data.....	51
D. Teknik Pengumpulan Data.....	52
E. Teknik Analisis Data.....	53
F. Definisi Operasional.....	54

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan di Sulawesi Selatan.....	56
B. Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007.....	60

BAB V PEMBAHASAN

A. Peta Kekuatan Politik.....	64
B. Konflik Antar Kekuatan Politik.....	71

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	84

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Salahudin Lessy. ANALISIS KEKUATAN-KEKUATAN POLITIK MENJELANG PEMILIHAN GUBERNUR SULAWESI SELATAN TAHUN 2007. (Pembimbing ; Drs. Muhammad Saad, MA dan Drs. A. Yakub, M.Si).

vi + 88 halaman + 2 lampiran

Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan peta kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007 dan menggambarkan konflik antar kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007. Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif serta dasar penelitian yang digunakan adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tetap memperhatikan aspek efisiensi serta efektifitas guna pencapaian tujuan penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2007, konstalasi kekuatan partai politik lebih mengarah pada tiga pasangan cagub-cawagub. Partai Golkar yang meraih suara pemilu legislatif 2004 berkisar 43,28 persen, telah menetapkan HM Amin Syam-Mansyur Ramly sebagai cagub-cawagub. Sementara, koalisi PAN, PDK, dan PDIP lebih memilih pasangan Syahrul Yasin Limpo dengan Agus Arifin Nu'mang. Sedang Koalisi Keumatan (PPP dan PKB) dan Kebangsaan (KKK) yang terdiri dari PSI, Partai Merdeka, PNBK, PKPB, PNI Marhaen, PPNUI, PIB, dan PPD menjagokan Aziz Qahhar Mudzakkar berpasangan dengan Mubyl Handaling.

Partai politik atau koalisi partai politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2007 dalam usaha memenangkan kandidat yang diusungnya menjadikan kesadaran primordial seperti latar belakang etnis dan asal daerah sebagai komoditas politik. Politik identitas yang cenderung digunakan oleh partai politik atau koalisi partai politik seperti ini berpotensi mengakibatkan konflik sebab kesetiaan primordial bersifat alami sehingga sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan serta membuat setiap anggota mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk membelanya mati-matian.

Pilkada Sulsel mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas. Para kandidat dan tim sukses bukan saja menyusun kalkulasi politik yang strategik, antara lain mengawinkan kekuatan partai, ideologi, etnik, atau juga uang, demi merebut kekuasaan yang lima tahun ke depan, tetapi pilkada harus menjadi babak baru tersemainya demokrasi lokal di Sulsel. Di sisi lain warga agar tidak terkecoh memilih pemimpin yang bersih, berhati nurani, populis, dan menjadi perekat masyarakat.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung dilaksanakan berdasarkan keputusan politik UU Nomor 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah yang memuat ketentuan tentang Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung¹. Pilkada secara langsung merupakan desain kelembagaan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas demokrasi di daerah. Gagasan utama dari pilkada memang ideal, dimana rakyat ditingkat lokal dapat berpartisipasi menentukan sendiri pimpinan daerahnya. Dengan cara ini maka cara pengangkatan oleh orang pusat seperti zaman sebelumnya akan berakhir.

Namun problemnya adalah perangkat UU Nomor 32 tersebut tidak memberikan alternatif pada calon-calon independen di luar partai politik. Hal ini mengakibatkan para calon-calon kepala daerah yang maju, akhirnya merupakan para wakil oligarki partai-partai utama seperti Golkar dan PDIP atau yang mendapat dukungan dari kedua partai tersebut. Karena itu hasil pilkada secara keseluruhan di dominasi oleh calon-calon bupati/walikota/gubernur dari dua partai utama ini, yang keduanya mempunyai akses luas ke birokrasi dan sumber-sumber logistik. Juga dalam kondisi seperti itu, kekuatan politik lama seperti militer atau elit-elit politik

¹ UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

lokal dapat memenangkan pilkada melalui kemampuan secara ekonomi dan politik. Hal ini semakin diperparah ketika aliansi diantara partai-partai besar dilakukan tanpa basis ideologi dan hanya mengejar kemenangan. Dari hasil pilkada di beberapa daerah dapat dilihat bagaimana PDI-P dapat berkoalisi dengan partai Golkar, PKB atau PPP dan bahkan PKS tanpa ada kejelasan ideologi dominan yang diusung oleh aliansi ini.

Corak budaya politik yang pragmatis dari para elit politik seperti ini memang terjadi di dalam pilkada. Corak demikian terlihat dari pola koalisi yang tidak mempertimbangkan batas-batas ruang ideologi dan pandangan politik. Masalahnya adalah corak budaya pragmatis itu baru sebatas pada upaya penggalangan di dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Manakala menghadapi realitas kekalahan, tidak semua elit politik itu bersifat pragmatis yakni menerima kekalahan tersebut. Sikap menggebu untuk memperoleh dan mempertahankan kekuasaan tidak jarang telah mampu menggelapkan mata sehingga membawa massa akar rumput untuk melakukan aksi-aksi kekerasan.

Dengan fenomena seperti itu berarti pemilihan kepala daerah langsung mengalami distorsi makna politik. Artinya kontestasi politik pilkada adalah kontestasi antar partai politik yang kuat, punya basis dukungan massa yang besar, dan populer di masyarakat. Kondisi pemilih juga masih memprihatinkan, terutama yang berkenaan dengan tingkat pengetahuan, pemahaman, dan pengalaman untuk memberikan suaranya dalam pilkada. Yang menarik tidak ada ketentuan jumlah atau presentase

atau banyaknya pemilih yang ikut memilih sehingga pilkada diakui. Apakah ini yang dinamakan demokrasi dan pemilihan demokratis.

Kekuatan lain yang juga mengekalkan dominasi kekuatan lama adalah penggunaan politik uang (*money politic*). Seperti diketahui dari calon yang terpilih, sebagian adalah mantan birokrat dan pengusaha yang punya kemampuan finansial. Penggunaan kapital bagi kepentingan politik merupakan hasil dari iklim demokrasi liberal seperti ini. Hal ini berakar dari tidak ada pembatasan dana kampanye akibat dari kapitalisme terhadap politik.

Istilah 'gizi' menjadi sangat populer untuk menyebut imbalan uang di dalam proses penjaringan calon yang akan di dukung oleh partai politik. Adanya unsur gizi dalam pilkada secara langsung akan sangat kental ketika partai politik menetapkan pasangan calon yang berasal dari luar kader partai. Calon dari luar ini biasanya adalah pejabat birokrasi, termasuk para kepala daerah yang sedang berkuasa (*incumbent*), mantan pejabat birokrasi, pengusaha yang secara akademis memiliki kemampuan melakukan transaksi-transaksi seperti itu. Di daerah-daerah yang wilayahnya relatif besar dan sudah maju, proses transaksi itu bisa mencapai ratusan juta bahkan milyaran rupiah.

Menjelang pelaksanaan pilkada atau masa pemilihan gubernur/wakil gubernur dan bupati/wakil bupati di daerah (provinsi/kabupaten), para warga masyarakat, yang sudah punya hak untuk terlibat di dalam pilkada, jadi sasaran perebutan oleh kekuatan-kekuatan politik seperti partai politik.

Kekuatan-kekuatan politik yang bertarung memenangkan pilkada tak punya pilihan lain, selain menciptakan kondisi terbaik dan menarik untuk merebut hati warga masyarakat yang akan memilih.

Munculnya konflik politik pada saat pilkada di beberapa daerah memang sudah diperkirakan sebelum pelaksanaannya. Rentang daerah pemilihan yang pendek dan terbatas memungkinkan lebih mudahnya terjadi akumulasi perbedaan yang berujung pada intensitas konflik yang meningkat. Di dalam pilkada, jarak antara pasangan calon dengan pendukungnya sangat dekat. Demikian juga jarak antara satu pendukung dengan pendukung yang lain. Konsekuensinya, emosi mereka menjadi lebih kuat dan karena itu lebih sulit dikendalikan manakala masing-masing berusaha memaksakan diri sebagai pemenang.

Selain itu, perundang-undangan yang mengatur pilkada secara langsung juga memiliki cela bagi lahirnya konflik politik yang berujung pada kekerasan. Seperti disinggung di atas, bahwa pintu pencalonan dalam pilkada hanya melalui partai politik atau gabungan dari partai politik yang memiliki suara 15 persen dari total perolehan suara didalam pemilihan legislatif. Aturan demikian hanya memungkinkan tokoh-tokoh yang dekat dengan partai politik saja yang bisa menjadi calon. Padahal, dibanyak daerah ditemui tokoh-tokoh lokal yang populer dan dipandang memiliki kualifikasi cukup baik yang tidak berafiliasi kepada partai tertentu.

Di dalam pilkada, partai politik yang seharusnya berperan sebagai agen acap kali menetapkan pasangan calon itu sesuai dengan apa yang

dikehendaki oleh para pengelola partai. Dalam beberapa kasus, yang dicalonkan oleh partai bukan saja tokoh yang selama ini dekat dengan partai, melainkan orang-orang yang mampu membangun patronase dengan imbalan materi kepada pucuk-pucuk pimpinan partai. Disini, mekanisme *principal-agent* terlihat tidak jalan. Implikasinya, pasangan calon yang diputuskan oleh partai politik tidak selalu berbanding lurus dengan apa yang dikehendaki oleh konstituen. Munculnya demonstrasi di sejumlah daerah yang menolak pasangan calon dari partai tertentu merupakan refleksi dari realitas seperti ini.

Secara politik, munculnya konflik seperti itu memang wajar saja terjadi. Di setiap usaha dalam memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan tidak lepas dari konflik. Adanya pilkada secara langsung merupakan mekanisme untuk melembagakan konflik agar tidak menjurus pada aksi kekerasan. Karena itu, masih menguatnya intensitas konflik bahkan disertai aksi kekerasan memperlihatkan masih belum kuatnya bangunan kelembagaan di dalam pilkada secara langsung.

Kalau mencermati prosedur maupun proses pemilihan di dalam pilkada secara langsung, secara metafora kita bisa menggambarkan bahwa kontestasi itu ibarat perlombaan balapan mobil. Pasangan calon kepala daerah itu berkemungkinan memenangkan pilkada manakala memiliki tiga kombinasi di dalam berkendara, yakni adanya mobil yang baik, sopir yang

piawai, dan bensin yang memadai.² Secara konseptual, metafora ini terwujud dari tiga modal utama yang dimiliki oleh para calon yang hendak mengikuti kontestasi di dalam pilkada secara langsung. Ketiga modal itu adalah modal politik (*political capital*), modal sosial (*social capital*), dan modal ekonomi (*economical capital*).³

Modal politik berarti adanya dukungan politik, baik dari rakyat maupun dari kekuatan-kekuatan politik yang dipandang sebagai representasi dari rakyat. Modal ini menjadi sentral bagi semua orang yang bermaksud mengikuti kontestasi di dalam pilkada secara langsung, baik di dalam tahap pencalonan maupun di dalam tahap pemilihan. Modal politik ini memiliki makna yang sangat penting karena pilkada secara langsung yang kita ikuti menggunakan mekanisme '*party system*' di dalam proses pencalonannya.

Modal kedua adalah modal sosial (*social capital*). Yang dimaksud dengan modal sosial disini adalah berkaitan dengan bangunan relasi dan kepercayaan (*trust*) yang dimiliki oleh pasangan calon dengan masyarakat yang memilihnya. Termasuk di dalamnya adalah sejauh mana pasangan calon itu mampu meyakinkan para pemilih bahwa mereka itu memiliki kompetensi untuk memimpin daerahnya. Agar bisa meyakinkan para pemilih, para calon itu harus dikenal oleh masyarakat. Suatu kepercayaan tidak akan tumbuh begitu saja tanpa didahului oleh adanya pengenalan.

² Marijan, K. 2005. *Otonomi Daerah dan Masalah Demokratisasi di Daerah*. Airlangga University Press. Surabaya. Hal 36-39

³ Marijan, K. 2006. *Demokratisasi di Daerah*. Pustaka Eureka, Surabaya. Hal 85

Tetapi, keterkenalan atau popularitas saja kurang bermakna tanpa ditindaklanjuti oleh adanya kepercayaan.

Modal yang ketiga adalah modal ekonomi (*economic capital*). Pemilu, termasuk pilkada secara langsung, jelas membutuhkan biaya yang besar. Modal yang besar itu tidak hanya dipakai untuk membiayai pelaksanaan kampanye. Yang tidak kalah pentingnya adalah untuk membangun relasi dengan para pendukungnya, termasuk di dalamnya adalah modal untuk memobilisasi dukungan pada saat menjelang dan berlangsungnya masa kampanye.

Sangat kuat hubungan antara apa yang terjadi dalam wilayah politik pilkada dengan masuknya kekuatan politik ekonomi di suatu daerah. Di Sultra misalnya, gosip, isu dan rumor sudah menjadi rahasia umum tentang seorang gubernur yang terpilih kuat kaitannya dengan pemilik kekuatan politik ekonomi di Jakarta. Sementara itu di Sulsel kekuatan politik ekonomi lokal dan Jakarta saling jalin menjalin untuk memenangkan pilkada yang akan datang, seperti juga pilkada yang lalu.

Fenomena pemilihan kepala daerah di Sulsel saat ini sedang membahana di mana-mana. Hampir di setiap sudut kota, di Makassar, misalnya, kita akan menjumpai atribut yang mewakili para kandidat dengan nuansa yang sangat promosif. Di media cetak, sampai minggu ini, disebutkan ada tiga pasang kandidat yang akan bertarung memperebutkan kursi "emas" di kantor Gubernur Sulsel. Ketiganya memiliki keunggulan masing-masing, di atas kertas akan menjadikan mereka sebagai pemenang.

Dengan tujuh juta jiwa penduduk Sulsel dan lima juta di antaranya adalah pemilih potensial, maka tidak salah kalau ketiga pasang kandidat itu berjuang keras untuk bisa mendapatkan dukungan mayoritas. Apalagi, pilkada ini merupakan kali pertama yang menerapkan sistem pemilihan secara langsung di daerah ini. Kalau sebelumnya rakyat Sulsel hanya berdiri di tepi panggung politik daerah karena pada pemilihan Gubernur 2002 lalu, kekuasaan memilih ada di tangan wakil rakyat di DPRD, maka ini adalah kali pertama rakyat Sulsel boleh ikut naik ke panggung politik, meski hanya dalam hitungan menit dan sebatas pada mencoblos gambar salah satu kandidat yang dipilih.

Bahkan daerah Sulsel yang kini memiliki 23 kabupaten, sudah dipetakan dengan garis tebal sebagai wilayah kantong suara masing-masing kandidat. Pemerhati pilkada Sulsel akan dengan segera tahu kantong suara milik siapa wilayah selatan-selatan, atau Bosowa, misalnya. Termasuk juga simpati masyarakat di bagian timur Sulsel terus dikejar dalam upaya memenangkan perebutan kursi nomor satu di Sulsel. Pemetaan kantong suara itu dipertegas dengan terbaginya zona lingkungan masyarakat sebagai wilayah sang kandidat. Ini dapat dilihat dari berbagai spanduk yang terpasang di atas jalan-jalan umum yang mengindikasikan bahwa kawasan tersebut adalah bagaikan milik seorang kandidat. Geliat pilkada memang semakin dinamis. Masyarakat pun ikut ramai dalam berbagai kegiatan lima tahunan ini. Baliho dan spanduk yang terpampang di berbagai tempat di sejumlah titik di sebagian jalan yang membelah wilayah Sulsel, menjanjikan

figur-figur yang pantas dipilih karena mereka adalah menganggap dirinya yang terbaik di Sulsel.

Faktor klaim seperti ini pada akhirnya dapat memicu lahirnya konflik. Di daerah masih terlihat jelas "garis-garis" pengelompokan sosial menurut tempat kelahiran, kekerabatan, suku, dan agama/ideologi. Eksklusivitas ini akan melahirkan klaim-klaim yang dapat merugikan kelompok lain. Karena itu, pilkada Sulsel mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas. Para kandidat dan tim sukses bukan saja menyusun kalkulasi politik yang strategik, antara lain mengawinkan kekuatan partai, ideologi, etnik, atau juga uang, demi merebut kekuasaan yang lima tahun ke depan, tetapi bisakah Sulsel menjadi babak baru tersemainya demokrasi lokal di Sulsel. Di sisi lain warga agar tidak terkecoh memilih pemimpin yang bersih, berhati nurani, populis, dan menjadi perekat masyarakat.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peta kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007?
2. Bagaimana konflik antar kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan yakni :

1. Untuk menggambarkan peta kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007.
2. Untuk menggambarkan konflik antar kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademik

Memberikan informasi seputar keberadaan kekuatan-kekuatan politik dan konflik antar kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulsel terhadap para akademisi sebagai bahan untuk kajian yang lebih lanjut dan juga masyarakat secara umum.

2. Manfaat Umum

Menjadi bahan pendidikan politik untuk masyarakat luas tentang peta kekuatan politik dan juga konflik antar kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA



A. Kekuatan Politik

Kekuatan-kekuatan politik merupakan partai politik dan kelompok kepentingan serta kelompok penekan yang berpengaruh pada berjalannya suatu sistem politik. Dimana kekuatan-kekuatan ini berada pada posisi *input* dalam sebuah sistem politik, dan melakukan mekanisme tuntutan serta dukungan. Sedangkan partai politik ditambahkan dengan mendudukan wakilnya dalam sistem politik itu sendiri.

1. Partai Politik

Partai berasal dari bahasa Latin '*partire*' yang bermakna membagi. Menurut Prof Miriam Budiardjo bahwa :

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik – biasanya dengan cara kontitusional – untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁴

Menurut J. Friedrich :

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materil.⁵

⁴ Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan kedua puluh sembilan. Hal 160-161

⁵ *Ibid.* Hal 161

Menurut R. H. Soltau :

Partai politik adalah sekelompok warga Negara yang sedikit banyak terorganisir, yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang – dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih – bertujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijaksanaan umum mereka.⁶

Menurut Sigmund Neumann dalam karangannya *Modern Political Parties* mengemukakan definisi sebagai berikut :

Partai politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.⁷

Menurut Jean Blondel :

Partai politik adalah kelompok kenggotaan terbuka dan yang fokus dengan spectrum soal-soal kebijakan.⁸

Fungsi partai politik menurut Maurice Duverger dalam *Political Parties, 1967* antara lain :⁹

1. Pendidikan politik (*Political education*).
2. Seleksi politik (*Political selection*).
3. Perhimpunan kegiatan politik (*Political aggregation*).
4. Saluran pernyataan kepentingan (*Interest articulation*).
5. Pengawasan/pengendalian politik (*Political control*).
6. Komunikasi politik (*Political communication*).

⁶*Ibid.* Hal 161

⁷*Ibid.* Hal 162

⁸Jean Blondel (1995) dalam Suryandji, Husni. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Ircisad, Yogyakarta, Hal 57

⁹Duverger dalam Rudy May. 2003. *Pengantar Ilmu Politik*. Refika, Bandung, Hal 92

Fungsi partai politik menurut G.B. de Huszar dan T.A.Stevenson dalam *Political Science, 1963* antara lain :¹⁰

1. Pengajuan calon-calon wakil rakyat (*Proposing candidates*).
2. Merangsang pendapat umum (*Stimulating public opinion*).
3. Mendorong rakyat untuk memilih (*Getting people to vote*).
4. Sikap kritis terhadap pemerintahan (*Criticism of the regime*).
5. Tanggungjawab pemerintahan (*Responsibility for government*).
6. Memilih para pejabat Negara (*Choosing appointive officer*).
7. Kesatuan dalam pemerintahan (*Unifying the government*).

Secara yuridis konstitusional, fungsi parpol diatur pula dalam Pasal 7 UU No 31/2002 tentang Partai Politik, antara lain sebagai (1) sarana penciptaan iklim yang kondusif serta sebagai perikat persatuan dan kesatuan bangsa untuk mensejahterakan masyarakat; (2) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat secara konstitusional dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara.¹¹

Fungsi utama partai politik ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang di susun berdasarkan kepentingannya. Berikut ini dikemukakan sejumlah fungsi partai politik, sebagai berikut :¹²

¹⁰ *Ibid.* Hal 91

¹¹ UU No 31/2002 tentang Partai Politik

¹² Budiardjo, Miriam. *Op.cit.* Hal 163-164

a. Partai politik sebagai sarana komunikasi politik

Komunikasi politik berlangsung dimana proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintah kepada masyarakat dan dari masyarakat kepada pemerintah. Dalam hal ini, partai politik berfungsi sebagai komunikator politik yang tidak hanya menyampaikan segala keputusan dan penjelasan pemerintah kepada masyarakat tetapi juga menyampaikan aspirasi dan kepentingan berbagai kelompok masyarakat kepada pemerintah.

Untuk melihat seberapa jauh peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat, sekali lagi harus dilihat dalam konteks prospektif sejarah perkembangan bangsa Indonesia itu sendiri. Pada awal kemerdekaan, partai politik belum berperan secara optimal sebagai wadah untuk menyalurkan aspirasi politik rakyat. Di sini boleh dikatakan bahwa rendahnya kapasitas sistem politik, lebih disebabkan oleh karena sistem politik masih berada pada tahap awal perkembangannya.

Pada fase berikutnya dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu masa Orde Lama, peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat juga belum terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Partai politik cenderung terperangkap oleh kepentingan partai dan/ atau kelompoknya masing-masing dan bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Sebagai akibat dari padanya adalah terjadinya ketidakstabilan sistem kehidupan politik dan

kemasyarakatan yang ditandai dengan berganti-gantinya kabinet, partai politik tidak berfungsi dan politik dijadikan panglima, aspirasi rakyat tidak tersalurkan akibatnya kebijaksanaan politik yang dikeluarkan saat itu lebih bermuansa kepentingan politik dari pada kepentingan ekonomi, rasa keadilan terusik dan ketidakpuasan semakin mengental, demokrasi hanya dijadikan jargon politik, tapi tidak disertai dengan upaya memberdayakan pendidikan politik rakyat.

Di zaman pemerintahan Orde Baru, peran partai politik dalam kehidupan berbangsa dicoba ditata melalui UU No. 3 Tahun 1973, partai politik yang jumlahnya cukup banyak di tata menjadi 3 kekuatan sosial politik yang terdiri dari 2 partai politik yaitu PPP dan PDI serta 1 Golkar. Namun penataan partai politik tersebut ternyata tidak membuat semakin berperannya partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat. Partai politik yang diharapkan dapat mewadahi aspirasi politik rakyat yang terkristal menjadi kebijakan publik yang populis tidak terwujud. Hal ini terlihat dari kebijaksanaan publik yang dihasilkan pada pemerintahan orde baru ternyata kurang memperhatikan aspirasi politik rakyat dan cenderung merupakan sarana legitimasi kepentingan penguasa dan kelompok tertentu.

Akibatnya pembangunan nasional bukan melakukan pemerataan dan kesejahteraan namun menimbulkan ketimpangan dan kesenjangan sosial di berbagai aspek kehidupan bermasyarakat,

berbangsa dan bernegara. Hal ini dikarenakan peran partai politik sebagai wadah penyalur aspirasi politik rakyat oleh pemerintahan orde baru tidak ditempatkan sebagai kekuatan politik bangsa tetapi hanya ditempatkan sebagai mesin politik penguasa dan asesoris demokrasi untuk legitimasi kekuasaan semata. Akibatnya peran partai politik sebagai wadah penyalur betul-betul terbukti nyaris bersifat mandul dan hampir-hampir tak berfungsi.

Era reformasi muncul sebagai gerakan korektif dan pelopor perubahan-perubahan mendasar di berbagai aspek kehidupan. Gerakan reformasi yang melahirkan proses perubahan dan melengserkan pemerintahan orde baru dan melahirkan UU No. 3 Tahun 1999 tentang partai politik memungkinkan sistem multi partai kembali bermunculan. Harapan peran partai sebagai wadah penyalur aspirasi politik akan semakin baik, meskipun hingga saat ini belum menunjukkan kenyataan. Hal ini terlihat dari kampanye Pemilu yang masih diwarnai banyaknya partai politik yang tidak mengaktualisasikan aspirasi rakyat dalam wujud program partai yang akan diperjuangkan. Mirip dengan fenomena lama dimana yang ada hanya janji dan slogan-slogan kepentingan politik sesaat. Meskipun rezim otoriter telah berakhir dan keran demokrasi telah dibuka secara luas sejalan dengan bergulirnya proses reformasi, namun perkembangan demokrasi belum terarah secara baik dan aspirasi masyarakat belum terpenuhi secara maksimal.

b. Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Sebagai sarana sosialisasi politik partai politik melakukan proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat. Melalui proses ini masyarakat memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik yang berlangsung dalam masyarakat dan berlangsung seumur hidup yang diperoleh secara sengaja melalui pendidikan formal maupun secara tidak sengaja melalui kontak dan pengalaman sehari-hari. Partai politik melakukan pendidikan politik melalui kegiatan kursus, latihan kepemimpinan diskusi dan keikutsertaan dalam berbagai forum pertemuan untuk menyebarkan nilai dan simbol yang dianggap ideal dan baik.

Budaya politik merupakan produk dari proses pendidikan atau sosialisasi politik dalam sebuah masyarakat. Dengan sosialisasi politik, individu dalam negara akan menerima norma, sistem keyakinan, dan nilai-nilai dari generasi sebelumnya, yang dilakukan melalui berbagai tahap, dan dilakukan oleh bermacam-macam agens, seperti keluarga, saudara, teman bermain, sekolah (mulai dari taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi), lingkungan pekerjaan, dan tentu saja media massa, seperti radio, TV, surat kabar, majalah, dan juga internet.

Proses sosialisasi atau pendidikan politik Indonesia tidak memberikan ruang yang cukup untuk memunculkan masyarakat

madani (*civil society*). Yaitu suatu masyarakat yang mandiri, yang mampu mengisi ruang publik sehingga mampu membatasi kekuasaan negara yang berlebihan. Masyarakat madani merupakan gambaran tingkat partisipasi politik pada takaran yang maksimal. Dalam kaitan ini, sedikitnya ada tiga alasan utama mengapa pendidikan politik dan sosialisasi politik di Indonesia tidak memberi peluang yang cukup untuk meningkatkan partisipasi politik masyarakat.

c. Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Rekrutmen politik sangat penting untuk kesinambungan sebuah sistem politik dan melalui proses ini akan terus ada orang-orang yang berperan untuk melanjutkannya.

Peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik dalam rangka meningkatkan partisipasi politik masyarakat, adalah bagaimana partai politik memiliki andil yang cukup besar dalam hal: (1) Menyiapkan kader-kader pimpinan politik; (2) Selanjutnya melakukan seleksi terhadap kader-kader yang dipersiapkan; serta (3) Perjuangan untuk penempatan kader yang berkualitas, berdedikasi, memiliki kredibilitas yang tinggi, serta mendapat dukungan dari masyarakat pada jabatan-jabatan politik yang bersifat strategis. Makin

besar andil partai politik dalam memperjuangkan dan berhasil memanfaatkan posisi tawarnya untuk memenangkan perjuangan dalam ketiga hal tersebut; merupakan indikasi bahwa peran partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berjalan secara efektif.

d. Partai politik sebagai sarana pengatur konflik

Dalam setiap masyarakat terdapat beragam pendapat dan perbedaan pendapat dimaksudkan untuk mengatur dan mengelola konflik ini agar tidak bersifat destruktif terhadap sistem politik melalui kegiatan-kegiatan dialog antara perbedaan sehingga ditemukan solusinya. Partai politik berfungsi mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung, dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan dari pihak-pihak yang berkonflik berupa keputusan politik untuk menyelesaikannya.

Dalam menjalankan peran sebagai pengatur konflik ini, partai-partai politik harus benar-benar mengakar di hati rakyat banyak, peka terhadap bisikan hati nurani masyarakat serta peka terhadap tuntutan kebutuhan rakyat. Dengan munculnya partai-partai baru tentu saja persyaratan mengakar di hati rakyat belum bisa terpenuhi dan bahkan boleh dikatakan masih jauh dari harapan. Sedangkan partai politik yang lama pun belum tentu telah memiliki akar yang kuat di hati rakyat, mengingat partisipasi politik rakyat masih lebih banyak bersifat semu. Artinya rakyat baru memiliki partisipasi yang

nyata adalah pada saat pelaksanaan pemilihan umum, sementara pada proses-proses pembuatan keputusan politik, dan kontrol terhadap pelaksanaan kebijakan politik masih tergolong dalam kategori yang relatif rendah. Meskipun akhir-akhir ini banyak demonstrasi dan kebebasan media massa sangat luas, batasan terhadap akses informasi makin lunak; namun bila dikaji substansi yang dituntut dan disampaikan masih lebih banyak didasarkan pada rekayasa kelompok politik dan/ atau elit politik tertentu. Belum cukup marak tuntutan dan suara-suara yang memperjuangkan kepentingan rakyat banyak

Berdasarkan asas dan orientasinya, partai politik diklasifikasikan menjadi tiga tipe yakni :¹³

- (1) *partai politik pragmatis*, suatu partai yang mempunyai program dan kegiatan yang tidak terikat kaku pada suatu doktrin atau ideologi tertentu. Artinya perubahan waktu, situasi dan kepemimpinan akan juga mengubah program, kegiatan dan penampilan partai politik tersebut;
- (2) *partai politik doktriner*, suatu partai politik yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideology. Ideologi yang dimaksud ialah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara kongkrit dan sistematis dalam bentuk-bentuk program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi secara ketat oleh aparat partai;

¹³ Suryadi, Budi. *Opcht*. Hal 62

(3) *partai politik kepentingan*, suatu partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

Kemudian dalam tahap perkembangan dan pertumbuhan partai politik, Samuel Huntington dalam mengklasifikasikan perkembangan dan pertumbuhan partai politik kedalam 4 (empat) tahap, yaitu :¹⁴

Tahap pertama, faksionalisasi. Pada masa ini masyarakat baru mengenal partai sebagai suatu intervensi cultural baru ditengah rendahnya tingkat partisipasi dan pelebagaan politik. Pada tahap ini separuh dari kesadaran politik masyarakat sudah mulai meninggalkan bentuk-bentuk organisasi politik tradisional. Namun pada saat bersamaan belum menemukan penggantinya yang sesuai dengan tuntutan keadaan.

Tahap kedua, polarisasi. Dalam tahap ini partai tampak berusaha menerobos dinding-dinding social tradisional yang melindungi faksi yang saling bersaing secara personal. Proses tinggal landas ini didukung oleh kondisi eksternal yang cukup memadai. Meningkatnya kesadaran politik warga Negara dengan sendirinya memperluas ruang lingkup partisipasi politik. Momen penting ini segera diikuti oleh meluasnya jenis dan macam kelompok-kelompok politik yang menghasilkan sebuah masyarakat majemuk dan kompleks.

¹⁴ *Ibid.* Hal 116-117

Tahap ketiga, ekspansi atau perluasan. Pada tahap ini partai berkembang menjadi organisasi politik yang semakin membutuhkan dukungan massa. Dalam persaingan antar partai dukungan massa yang luas dan beragam serta berlapis-lapis merupakan syarat pokok untuk pembangunan kekuatan partai. Kekuatan-kekuatan social yang tumbuh dan berkembang membutuhkan system partai sebagai sarana menyalur dan mengendalikan eksistensi kepentingan kelompok.

Tahap keempat, pelembagaan. Pada titik ini system partai relative telah mencapai tahap mapan. Ditandai antara lain, dengan terbentuknya system dua partai, system multipartai atau system partai tunggal dominant. Sistem partai yang telah berkembang relative tidak banyak mengalami perubahan kuantitas. Pergantian lebih banyak terjadi pada aspek peralihan pemerintahan oleh partai atau koalisi partai kepada pemerintahan oleh partai atau koalisi partai lain.

2. Kelompok Kepentingan

Secara fundamental memang ada perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan. Partai politik senantiasa aktif mencari, mengajukan serta memilih calon-calon pemegang jabatan resmi dalam pemerintahan; mengambil peranan dan tanggung jawab dalam mengatur negara, membuat sekaligus memaksakan berlakunya kebijaksanaan umum, dan jika sudah tidak berkuasa lagi, partai yang bersangkutan akan mengambil alternatif lain yang biasanya berperan sebagai pengecam

kebijaksanaan pemerintah yang berkuasa. Sedangkan kelompok kepentingan tidak mengemban berbagai tanggung jawab seperti yang ada pada partai politik tersebut. Aktivitas kelompok kepentingan umumnya menyangkut tujuan-tujuan yang lebih terbatas, dengan sasaran-sasaran yang monolitik, serta dengan intensitas usaha yang tidak berlebihan.

Sebagai kelompok yang berbeda dengan partai politik, kelompok kepentingan bias menghimpun ataupun mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan-tindakan politik yang berada diluar tugas partai. Upaya warga negara untuk mengartikulasikan segala kepentingannya inilah yang sering dikenal dengan istilah kelompok kepentingan. Setiap warga negara mengakomodir kepentingannya dalam sebuah kelompok-kelompok yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah.

Miriam Budiardjo menyebutkan :

Partai politik juga berbeda dengan kelompok penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*)¹⁵.

Ada beberapa definisi kelompok kepentingan dari para ahli politik, seperti Ramlan Surbakti menjelaskan bahwa :

Kelompok kepentingan adalah sejumlah orang yang memiliki kesamaan sifat, sikap, kepercayaan dan atau tujuan, yang sepakat mengorganisasikan diri untuk melindungi dan mencapai tujuan¹⁶

¹⁵ Budiardjo, Miriam. *Op.cit.* Hal 162

¹⁶ Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gransindo, Jakarta. Hal 109

Derbyshire mengatakan yakni :

Kelompok kepentingan sebagai suatu organisasi yang didirikan untuk mewakili, mempromosikan dan mempertahankan sebuah kepentingan tertentu/sekumpulan kepentingan¹⁷

Berdasarkan beberapa definisi yang disampaikan sejumlah ahli politik tersebut, bisa ditarik beberapa substansi pemahaman konsep kelompok kepentingan. *Pertama*, setiap kelompok kepentingan merupakan sekumpulan orang yang mengorganisasikan dirinya atas nama satu atau lebih kepentingan tertentu yang diperjuangkan. *Kedua*, adanya kepentingan yang sama, menyatukan sekelompok orang untuk bergabung membentuk satu organisasi dengan nama tertentu. *Ketiga*, setiap aktivitas kelompok kepentingan, selalu bergandengan dengan isu publik yang ditujukan untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah. Jadi, keberadaan kelompok kepentingan, otomatis dengan eksistensi suatu pemerintahan dalam sistem politik.

Keempat, setiap aktivitas yang dilakukan kelompok kepentingan, akan mengatasnamakan masyarakat, mengingat fungsinya sebagai artikulator (mengartikulasi) atau pemilah kepentingan-kepentingan dalam masyarakat dan mengubahnya menjadi tuntutan yang akan ditujukan pada pemerintah atau melalui lembaga lain seperti partai politik. *Kelima*, aktivitas kelompok kepentingan tidak ditujukan untuk memperoleh jabatan publik, tetapi lebih pada upaya partisipasi politik atau berusaha mempengaruhi kebijakan yang diambil pemerintah.

¹⁷ Suryadi, Budi. *Op.cit.* Hal 47

Keenam, adanya berbagai variasi atau tipe kelompok kepentingan artinya tidak memiliki bentuk tunggal, tergantung dari perbedaan karakteristik keorganisasian dari kelompok kepentingan.



Gabriel A Almond (1993) menyebut kelompok-kelompok kepentingan berbeda-beda antara lain dalam hal struktur, gaya, sumber pembiayaan, dan basis dukungannya; dan perbedaan-perbedaan ini sangat mempengaruhi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial suatu bangsa. Ada 4 (empat) klasifikasi kelompok-kelompok kepentingan, antara lain :¹⁸

a. Kelompok Anomik

Kelompok ini yang terbentuk didalam masyarakat secara spontan dan hanya seketika, dan arena tidak memiliki nilai-nilai dan norma-norma yang mengatur, kelompok ini sering bertumpang-tindih (*overlap*) dengan bentuk-bentuk partisipasi non-konvensional, seperti demonstrasi, kerusuhan, tindak kekerasan politik dan sebagainya. Sehingga apa yang dianggap sebagai perilaku anomik mungkin saja tidak lebih dari tindakan kelompok-kelompok terorganisir (bukan kelompok anomik) yang menggunakan cara-cara non konvensional atau kekerasan. Akan tetapi, bila kelompok terorganisir tidak terwakili dalam sistem politiknya, kekecewaan yang menumpuk bias

¹⁸ Almond dalam Suryadi, Budi. *Op cit.* Hal 48-52

diletupkan akibat suatu insiden. Akhir-akhir ini di beberapa sistem politik terlihat kegiatan kelompok kepentingan yang bersifat anomik.

b. Kelompok Non-Assosiasional

Kelompok ini jarang yang terorganisir rapi dan kegiatannya bersifat kadangkala. Biasanya berwujud kelompok-kelompok keluarga dan keturunan atau etnik, regional, status dan kelas yang menyatakan kepentingan secara kadangkala melalui individu-individu, kepala keluarga atau pemimpin agama. Kegiatan kelompok non assosiasional terutama sekali merupakan ciri masyarakat belum maju, dimana kesetiaan kesukuan atau keluarga-keluarga aristokrat mendominasi kehidupan politik dan dimana kelompok kepentingan yang diorganisir dan mengkhusus tidak ada atau masih lemah.

c. Kelompok Institusional

Kelompok ini bersifat formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan social lain disamping artikulasi kepentingan. Baik sebagai badan hukum maupun sebagai kelompok-kelompok lebih kecil dalam badan hukum itu, kelompok semacam ini biasanya menyatakan kepentingannya sendiri maupun mewakili kepentingan dari kelompok-kelompok lain dalam masyarakat. Kelompok ini sangat berpengaruh akibat dari basis organisasinya yang kuat.

d. Kelompok Asosiasional

Kelompok asosiasional meliputi serikat buruh, kamar dagang atau perkumpulan usahawan dan industrialis, paguyuban etnik, persatuan-persatuan yang diorganisir oleh kelompok-kelompok agama dan sebagainya. Secara khas kelompok ini menyatakan kepentingan dari suatu kelompok khusus, memakai tenaga staf professional yang bekerja penuh, dan memiliki prosedur teratur untuk merumuskan kepentingan dan tuntutan.

3. Kelompok Penekan

Selain kelompok kepentingan yang berada pada posisi input sistem politik adalah kelompok penekan. Istilah kelompok penekan sebenarnya tidak dikenal dalam model system politik Gabriel A Almond dan G Bingham Powel, walaupun kelompok kepentingan dan kelompok penekan hampir sama identitasnya.

Perbedaan antara kelompok kepentingan dengan kelompok penekan lebih terletak pada cara dan sasarannya. Sebuah kelompok penekan, secara sengaja mengelompokkan diri untuk satu tujuan khusus, setelah itu bubar dan secara khusus pula berusaha mempengaruhi atau menekan para pejabat pemerintah untuk menyetujui tuntutan mereka. Sedangkan kelompok kepentingan sasarannya lebih kepada keterlibatan dalam merumuskan alternatif kebijakan dengan cara-cara yang persuasif

atau tidak melakukan dengan cara-cara tekanan terhadap pejabat pemerintah.¹⁹

Kelompok penekan tidak langsung mengambil bagian dalam memperoleh kekuasaan atau dalam melancarkan kekuasaan itu sendiri, mereka bertindak mempengaruhi kekuasaan dan tidak terlibat sebagai pelaku didalamnya akan tetapi hanya melancarkan tekanan-tekanan terhadap kekuasaan yang sedang berjalan.

Kelompok penekan berusaha untuk mempengaruhi orang-orang yang memegang dan menjalankan kekuasaan, bukan menempatkan orang-orang mereka dalam posisi pemegang kekuasaan atau setidaknya secara resmi menempatkan orang-orang mereka dalam kekuasaan tersebut. Sekalipun kelompok penekan tertentu mempunyai wakil-wakil mereka di pemerintahan atau di badan-badan legislatif tetapi hubungan para individu tersebut dengan kelompok yang mereka wakili tetap rahasia. Pada umumnya kelompok penekan itu merupakan organisasi non politik dan tekanan politik bukan satu-satunya kegiatan mereka.

¹⁹Surbakti, Ramlan. *Op.cit.* Hal 110

B. Teori Pertukaran Jaringan dan Teori Pilihan Rasional

1. Teori Pertukaran Jaringan

Teori pertukaran jaringan (*network exchange theory*) atau biasa disingkat NET mengombinasikan teori pertukaran sosial dan analisis jaringan. Kombinasi itu diasumsikan menyempurnakan kelebihan kedua teori tersebut sambil memperbaiki kekurangannya. Disatu sisi, analisis jaringan mempunyai keunggulan mampu membangun representasi yang kompleks dari interaksi sosial mulai dari model relasi sosial yang sederhana dan dapat digambarkan, tetapi mempunyai kekurangan tentang konsep relasi sosial itu sendiri. Di lain pihak, teori pertukaran sosial mempunyai keunggulan karena memiliki model aktor tunggal yang membuat pilihan berdasarkan manfaat yang mungkin diraih, namun mempunyai kekurangan karena ia melihat struktur sosial terutama sebagai hasil dari pilihan individu ketimbang sebagai suatu determinan pilihan-pilihan tersebut.²⁰

Secara sederhana dapat dikatakan bahwa teori jaringan mempunyai model struktur yang kuat (jaringan relasi), tetapi mempunyai model yang lemah mengenai unsur relasi, sementara teori pertukaran mempunyai model relasi antar aktor yang kuat (pertukaran), tetapi memiliki model struktur sosial yang lemah. Model teori pertukaran sosial dari pertukaran aktor untuk memperbesar keuntungan akan melengkapi isi yang kurang dipunyai analisis jaringan, dan analisis

²⁰ Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Moderen*. Kencana, Jakarta. Hal 387-389

jaringan akan menyediakan model struktur sosial sebagai variable independent yang kurang dimiliki oleh teori pertukaran.

Ide fundamental dibalik teori pertukaran jaringan adalah bahwa setiap pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Apa-apa yang dipertukarkan kurang penting dalam pendekatan ini jika dibandingkan dengan berbagai ukuran, bentuk, dan koneksi dari jaringan dimana pertukaran itu terjadi. Sebagaimana teori pertukaran sosial, teori pertukaran jaringan terutama menitikberatkan pada pada isu kekuasaan. Premis dasarnya adalah bahwa semakin besar peluang aktor untuk melakukan pertukaran, semakin besar kekuasaan si aktor. Diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan, aktor akan bervariasi dalam peluang mereka untuk bertukar keuntungan dan karenanya akan bervariasi dalam kemampuannya untuk mengontrol atau mengakumulasi profit.

2. Teori Pilihan Rasional

Meski dipengaruhi perkembangan teori pertukaran, teori pilihan rasional umumnya berada di pinggiran aliran utama teori sosiologi. Melalui upaya James S. Coleman, teori ini menjadi salah satu teori "hebat" dalam sosiologi masa kini. Teori pilihan rasional Coleman tampak jelas dalam gagasan dasarnya bahwa "tindakan perseorangan mengarah kepada sesuatu tujuan dan tujuan itu (dan juga tindakan) ditentukan oleh nilai atau pilihan (*preferensi*)". Tetapi selanjutnya ia

menyatakan bahwa untuk maksud yang sangat teoritis, ia memerlukan konsep yang lebih tepat mengenai actor rasional yang berasal dari ilmu ekonomi yang melihat actor memilih tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan atau yang memuaskan keinginan dan kebutuhan mereka.

Ada dua unsure utama dalam teori Coleman, yakni aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan yang dapat dikontrol oleh aktor. Coleman menjelaskan interaksi antara aktor dan sumber daya secara rinci menuju ketinggian sistem sosial :

Basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan...terlibat dalam tindakan...Selaku aktor yang mempunyai tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.²¹

Hal ini menjelaskan bahwa seseorang secara sepihak memindahkan kontrol atas tindakannya kepada orang lain disebabkan keinginan untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Biasanya upaya memaksimalkan kepentingan individual itu menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan ini menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi pemindahan kontrol secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan individu tak mesti menyebabkan keseimbangan sistem.

²¹ *Ibid.* Hal 391-400

C. Konflik Politik

Dalam kehidupan sosial manusia dimana saja dan kapan saja tidak pernah lepas dari apa yang namanya konflik. Istilah konflik secara etimologis berasal dari bahasa Latin "con" yang berarti bersama dan "fligere" yang berarti benturan atau tabrakan. Dengan demikian konflik dalam kehidupan sosial berarti benturan kepentingan, keinginan, pendapat, dan lain-lain yang paling tidak melibatkan dua pihak atau lebih. William Chang mempertanyakan "benarkah konflik sosial hanya berakar pada ketidakpuasan batin, kecemburuan, iri hati, kebencian, masalah perut, masalah tanah, masalah tempat tinggal, masalah pekerjaan, masalah uang, dan masalah kekuasaan?" ternyata jawabnya "tidak" dan dinyatakan oleh Chang bahwa emosi manusia sesaat pun dapat memicu terjadinya konflik sosial.

Dalam *International Encyclopaedia of The Social Sciences* Vol.3 (halaman 236-241) diuraikan mengenai pengertian konflik dari aspek antropologi, yakni ditimbulkan sebagai akibat dari persaingan paling tidak antara dua pihak dimana tiap-tiap pihak dapat berupa perorangan, keluarga, kelompok kekerabatan, satu komunitas atau mungkin satu lapisan kelas sosial pendukung ideologi tertentu, satu organisasi politik, satu suku bangsa, atau satu pemeluk agama tertentu. Dengan demikian pihak-pihak yang dapat terlibat dalam konflik meliputi banyak macam bentuk dan ukurannya. Selain itu dapat pula dipahami bahwa pengertian konflik secara antropologis

tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan secara bersama-sama dengan pengertian konflik menurut aspek-aspek lain yang semuanya itu turut ambil bagian dalam memunculkan konflik sosial dalam kehidupan kolektif manusia.²²

Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan. Konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna mendapatkan dan mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif terakhir. Dengan demikian, konflik dibedakan menjadi konflik yang berwujud kekerasan dan konflik yang tak berwujud kekerasan.

Pada dasarnya konflik politik disebabkan oleh kemajemukan horizontal dan kemajemukan vertikal. Kemajemukan horizontal ialah struktur masyarakat yang majemuk secara kultural seperti suku, bangsa, daerah, agama, ras dan majemuk sosial dalam arti perbedaan pekerjaan dan profesi seperti petani, buruh, pedagang, pengusaha, pegawai negeri sipil, militer, wartawan, dokter. Dan dalam arti perbedaan karakteristik tempat tinggal seperti desa dan kota.

²² Chang, William. *Dimensi Etis Konflik Sosial*. Dalam KOMPAS Rabu 2 Februari 2001. Hal 6

Kemajemukan horizontal kultur dapat menimbulkan konflik karena masing-masing unsur kultur berupaya mempertahankan identitas dan karakteristik budayanya dari ancaman kultur lain. Dalam masyarakat yang berciri demikian ini, apabila belum ada suatu konsensus nilai yang menjadi pegangan bersama, konflik politik karena benturan budaya akan menimbulkan perang saudara ataupun gerakan separatisme.

Kemajemukan horizontal sosial dapat menimbulkan konflik sebab masing-masing kelompok yang berdasarkan pekerjaan dan profesi serta tempat tinggal tersebut memiliki kepentingan berbeda bahkan saling bertentangan. Kelompok masyarakat yang tinggal dikota, misalnya menghendaki harga beras dan bahan bakar minyak dikendalikan oleh pemerintah, dan kalau perlu disubsidi oleh pemerintah, sedangkan masyarakat yang tinggal didesa menghendaki agar pemerintah membiarkan harga-harga beras dan bahan bakar minyak berkembang sesuai dengan mekanisme pasar. Sebaliknya, pemerintah hanya berperan dalam menciptakan dan menegakkan aturan main yang adil.

Kemajemukan vertikal ialah struktur masyarakat yang terpolarisasikan menurut kepemilikan kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Kemajemukan vertikal dapat menimbulkan konflik sebab sebagian besar masyarakat yang tidak memiliki atau hanya memiliki sedikit kekayaan, pengetahuan, dan kekuasaan akan memiliki kepentingan yang bertentangan dengan kelompok kecil masyarakat yang mendominasi ketiga sumber pengaruh tersebut. Jadi, distribusi kekayaan, pengetahuan, dan

kekuasaan yang pincang merupakan penyebab utama timbulnya konflik politik.

Konflik terjadi manakala terjadi benturan kepentingan. Dalam rumusan lain dapat dikemukakan konflik terjadi jika ada pihak yang merasa diperlakukan tidak adil atau manakala pihak berperilaku menyentuh "titik kemarahan" pihak lain. Dengan kata lain, perbedaan kepentingan karena kemajemukan vertikal dan horizontal merupakan kondisi yang harus ada (*necessary condition*) bagi timbulnya konflik, tetapi perbedaan kepentingan itu bukan kondisi yang memadai (*sufficient condition*) untuk menimbulkan konflik.

1. Tipe-tipe Konflik

Konflik politik dikelompokkan menjadi 2 (dua) tipe yaitu konflik positif dan konflik negatif²³. Konflik positif merupakan konflik yang tidak mengancam eksistensi sistem politik dan biasanya disalurkan lewat mekanisme penyelesaian konflik yang disepakati bersama dalam konstitusi. Mekanisme yang dimaksud berupa lembaga-lembaga demokrasi seperti partai politik, badan-badan perwakilan rakyat, pengadilan, dan forum-forum terbuka yang lain. Tuntutan akan perubahan yang diajukan oleh sejumlah kelompok masyarakat melalui lembaga-lembaga itu merupakan contoh konflik positif.

²³ *Ibid.*, Hal 153-154

Sedangkan konflik negatif merupakan konflik yang dapat mengancam eksistensi sistem politik dan biasanya disalurkan melalui cara-cara nonkonstitusional seperti kudeta, separatisme, terorisme, dan revolusi. Kategorisasi ini mengandung kelemahan bila mayoritas masyarakat memandang lembaga yang ada tidak mencerminkan kepentingan umum maka konflik yang disalurkan melalui mekanisme politik justru dipandang sebagai konflik yang negatif. Sebaliknya, tindakan yang menentang system yang tidak mencerminkan kepentingan umum dipandang sebagai konflik yang positif.

2. Struktur Konflik

Situasi konflik pada dasarnya dibedakan menjadi konflik menang-kalah (*zero-sum conflict*) dan konflik menang-menang (*non zero-sum conflict*). Konflik menang-kalah ialah situasi konflik yang bersifat antagonistic sehingga tidak memungkinkan tercapainya suatu kompromi diantara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Ciri struktur konflik ini tidak memungkinkan adanya kerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh pihak yang menang saja dan yang dipertaruhkan biasanya menyangkut hal-hal yang dianggap prinsipil seperti harga diri, kepercayaan, masalah hidup atau mati, dan jabatan penting pemerintahan.

Konflik menang-menang ialah situasi konflik dimana pihak-pihak yang terlibat dalam konflik masih mungkin untuk mengadakan

kompromi dan bekerja sama sehingga semua pihak akan mendapatkan bagian dari konflik tersebut. Yang dipertaruhkan biasanya bukan hal-hal yang prinsipil, tetapi bukan pula hal yang tidak penting. Dianggap penting maka diadakan dialog, kompromi, dan kerja sama yang menguntungkan kedua pihak. Ciri struktur konflik ini yakni kompromi dan bekerja sama, hasil kompetisi akan dinikmati oleh kedua pihak tetapi tidak secara maksimal.

3. *Teori-teori Konflik*

Teori konflik telah diulas dan dikembangkan oleh banyak sosiolog. Mereka antara lain, Karl Marx, Ralf Dahrendorf, George Simmel, dan Lewis Coser. Teori konflik yang digagas oleh Marx didasarkan pada kekecewaannya pada sistem ekonomi kapitalis yang dianggapnya mengeksploitasi buruh. Bagi Marx, dalam masyarakat terdapat dua kekuatan yang saling berhadapan, yakni kaum borjuis yang menguasai sarana produksi ekonomi dan kaum proletar atau buruh yang dikendalikan oleh kaum borjuis. Antara kedua kelompok ini selalu terjadi konflik. Dalam *The Communist Manifesto*, Marx mengatakan, "Sejarah dari semua masyarakat yang ada hingga saat ini adalah sejarah perjuangan kelas," yaitu kelas buruh melawan kelas borjuis, yang pada akhirnya akan dimenangkan kaum proletar, sehingga tercipta tatanan masyarakat tanpa hierarkis, yakni

komunisme. Karl Marx melihat masyarakat manusia sebagai sebuah proses perkembangan yang akan menyudahi konflik melalui konflik.

Penerus gagasan Marx, di antaranya adalah Ralf Dahrendorf. Dia melakukan revisi atas pemikiran Marx. Baginya, pengelompokan kelas sosial tidak lagi hanya didasarkan atas kepemilikan sarana-sarana produksi, tetapi juga atas hubungan-hubungan kekuasaan. Terdapat sejumlah orang yang memiliki dan turut serta dalam struktur kekuasaan, terdapat pula yang tidak masuk kekuasaan. Menurut Dahrendorf, sebagai koreksi atas pemikiran Marx, telah terjadi dekomposisi modal (menimbulkan kesulitan mengidentifikasi kaum borjuis yang monopolistis karena para pegawai pun kini ikut memiliki saham perusahaan); dekomposisi tenaga kerja (kaum proletar tidak lagi homogen; secara hierarkis di antara mereka tersebar menempati posisi tertentu), dan timbulnya kelas menengah baru (karena terjadinya peningkatan kesejahteraan di kalangan kaum buruh).

Dalam hal ini terkandung tiga konsep penting: kekuasaan, kepentingan, dan kelompok sosial. Pada gilirannya nanti diferensiasi kepentingan yang terjadi dapat melahirkan kelompok konflik potensial atau kelompok konflik aktual yang berbenturan karena punya kepentingan antagonistic. Menurut Coser, konflik itu memiliki fungsi sosial. konflik sebagai proses sosial dapat merupakan mekanisme lewat mana kelompok-kelompok dan batas-batasnya

dapat terbentuk dan dipertahankan. konflik juga mencegah suatu pembekuan sistem sosial dengan mendesak adanya inovasi dan kreativitas. Karena konflik lebih banyak dilihat dari segi fungsi positifnya, maka Teori konflik yang dikembangkan Coser disebut pula fungsionalisme konflik sosial.

Konflik sering memperkuat dan mempertegas batas kelompok dan meningkatkan penggalangan solidaritas internal kelompok. Konflik antarkelompok merupakan penghadapan antara *in-group* dan *out-group*. Ketika konflik terjadi, masing-masing anggota dalam suatu kelompok akan meningkatkan kesadaran sebagai sebuah kelompok (*in-group*) untuk berhadapan dengan kelompok lain (*out-group*). Konflik dapat menetapkan dan menjaga garis batas antara dua atau lebih kelompok. Konflik dengan kelompok lain dapat memperkuat kembali identitas kelompok dan melindunginya agar tidak lebur ke dalam dunia sosial lainnya. (Poloma, 1987: 108). Ketika ada ancaman dari luar, maka kelompok tidak mungkin memberikan toleransi pada perselisihan internal.

4. Intensitas Konflik

Intensitas konflik lebih merujuk pada besarnya energi yang dikeluarkan dan tingkat keterlibatan partisipan dalam konflik. Sebaliknya, konflik yang mengandung kekerasan lebih merujuk pada akibat konflik dari pada sebab-sababnya. Apabila kondisi organisasi

kelompok yang berkonflik secara sah terorganisasikan maka konflik yang terjadi cenderung tanpa kekerasan. Dan kelompok yang berkonflik tidak terorganisasikan secara sah maka kemungkinan konflik yang mengandung kekerasan semakin besar.

Selain itu, apabila dari segi kelas yang mendominasi dan yang didominasi pertentangan itu mencakup berbagai sektor, seperti kelas yang dominan di dalam negara, industri, partai dan agama berhadapan dengan kelas yang mendominasi di dalam negara, industri, partai dan agama maka konflik cenderung mengandung kekerasan. Pertentangan yang bersifat kelas itu terjadi pada satu sektor saja, misalnya disatu pihak menjadi kelas dominan di dalam negara tetapi menjadi kelas yang didominasi dalam agama maka konflik tidak mengandung kekerasan.

Apabila pihak yang berkonflik memandang kemungkinan perubahan status tidak hanya terjadi bagi keturunannya tetapi juga bagi diri sendiri maka konflik tidak akan bersifat intens. Sebaliknya, maka konflik tidak saja cenderung intens tetapi juga mengandung kekerasan. Pada dasarnya terdapat dua factor yang mempengaruhi intensitas suatu konflik yakni besar kecilnya sumber yang diperebutkan dan besar kecilnya resiko yang timbul dari konflik tersebut.

5. Mengelola Konflik

Menurut Johnson (1990: 162), perhatian utama Teori Konflik adalah pada mengenal dan menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan sosial, sebab, dan bentuknya, dan dalam banyak hal, akibatnya dalam perubahan sosial. Dengan demikian, konflik perlu dikelola. Konflik yang tidak dikelola dapat menimbulkan perubahan sosial yang tidak diharapkan, sementara konflik yang dikelola dapat mengarahkan perubahan sosial ke arah yang diharapkan. Teori Konflik dengan analisis fungsional terus dikembangkan oleh sejumlah pakar, antara lain melalui berbagai studi eksperimen, di antaranya yang sangat menonjol adalah eksperimen *Musafer Sherif*.

Dalam upaya pengembangan teori ini, *Sherif* melakukan eksperimen, dengan mengumpulkan sejumlah orang, dengan tahapan sebagai berikut: (1) pemilihan teman secara spontan, (2) pembentukan kelompok, (3) konflik antarkeompok, dan (4) kerja sama antarkeompok atau pengurangan konflik antarkeompok (Taylor dan Moghaddam, 1994). Pada awalnya setiap orang mencari pilihan kawan yang cocok sehingga terbentuklah kelompok-kelompok. Dalam pembentukan kelompok ini diperlukan adanya kerja sama antarindividu. Mereka melakukan serangkaian tugas bersama. Pada saat yang sama mereka juga membangun kultur kelompok.

Ketika konflik terjadi, di kalangan para anggota kelompok terjadi persepsi yang bias. Terjadi peningkatan sikap positif terhadap kelompok dirinya masing-masing (*in-group*) berupa solidaritas internal, dan sikap negatif terhadap kelompok lain (*out-group*). Kekompakan, komitmen, konformitas pada *in-group* makin tinggi, juga muncul kepemimpinan yang bersifat agresif. Konflik antarkelompok ini kemudian dapat dikendalikan ketika semua kelompok dihadapkan pada tugas bersama yang merupakan tujuan bersama yang lebih tinggi (*superordinate goals*), yang pencapaiannya tak mungkin tanpa partisipasi seluruh kelompok. Maka terjadilah transformasi dari situasi konflik ke relasi antar kelompok yang harmonis.

Penyelesaian konflik antar kelompok berdasarkan Teori Konflik, menurut eksperimen Sherif, adalah berada pada tahap terakhir, yakni bagaimana mengubah konflik, pertikaian, atau perselisihan menjadi sebuah bentuk kerja sama. Menurut Sherif, konflik antar kelompok itu akan berubah menjadi kerja sama antar kelompok apabila kepada mereka diintroduksikan *superordinate goals* secara meyakinkan bahwa di atas hal-hal yang membuat mereka saling bermusuhan itu, ada hal yang jauh lebih penting untuk dihadapi bersama.

D. Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung

Pilkada secara langsung adalah perkembangan menarik dalam sejarah perpolitikan lokal dinegeri ini. Pilkadal merupakan momentum peletakan dasar bagi fondasi kedaulatan rakyat dan sistem politik serta demokrasi di aras lokal. Fenomena menunjukkan besarnya antusiasme masyarakat dalam mengapresiasi proses pilkadal dan hal ini bisa dimaknai sebagai operasionalisasi otonomi masyarakat untuk menentukan sendiri dan langsung kepala daerahnya, terlepas dari paksaan maupun politik mobilisasi.²⁴

Partisipasi aktif dari masyarakat lokal merupakan upaya untuk mewujudkan *Civil Society* yang mampu memperkuat ide demokrasi yang diterapkan di Indonesia. Semangat menjalankan ide demokrasi dari pemikir-pemikir barat dan membangun kemandirian warga dengan sebutan *Civil Society* inilah yang mendorong pemerintah untuk menterjemahkan ide tersebut pada tataran pragmatis dengan mengeluarkan UU otonomi daerah dengan berbagai revisi sampai pada UU Nomor 32 tahun 2004.

Pemilihan kepala daerah secara langsung itu didasarkan pada Undang-Undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang ditandatangani Presiden Megawati Soekarnoputri pada 15 Oktober 2004 dan di dalamnya memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah langsung. Dalam pasal 56 ayat (1) dan (2) disebutkan:

²⁴ Aminah, Siti. *Opctt.* Hal 79-80

- (1) Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dipilih dalam satu pasangan calon yang dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
- (2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Kemudian, Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan pada 11 Februari 2005 oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.3 Tahun 2005 kemudian merevisi sejumlah ketentuan dalam UU No.32/2004 ditetapkan 27 April 2005 sebagai respon atas putusan *judicial review* Mahkamah Konstitusi. Berbarengan dengan keluarnya Perpu itu, pemerintah juga mengeluarkan PP No.17/2005 sebagai revisi atas PP No.6/2005.

Wacana otonomi daerah dan pembangunan politik lokal juga dipengaruhi oleh perubahan dramatis pada situasi ekonomi sebagai hasil dari krisis keuangan di Asia dan transisi dari regim orde baru. Fenomena tersebut telah memberikan pengaruh penting pada upaya pemerintah Indonesia dalam membangun kebijakan otonomi regional atau otonomi daerah melalui beberapa regulasi kebijakan, salah satunya dengan mengeluarkan UU No. 22 tahun 1999 dalam Undang-undang desentralisasi dan otonomi daerah pada tanggal 1 Januari 2001 yang diikuti dengan otonomi khusus untuk Aceh dan Papua.

Desentralisasi dan undang-undang otonomi khusus tersebut dikembangkan dari bentuk sentralisasi pemerintahan ke bentuk kewenangan

pemerintahan lokal yang didasarkan pada rasa bertanggungjawab terhadap politik lokal di Indonesia. Dan telah menjadi hal yang penting dan dinamis sejak diterapkan otonomi daerah melalui UU nomor 32 tahun 2004, terutama yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah secara langsung. Hal ini merupakan jawaban atas sentralistik politik pada masa orde baru, dimana setiap kebijakan langsung berasal dari pusat.

Selain faktor situasi ekonomi yaitu krisis keuangan di Asia, kesenjangan antara pusat dan daerah di dalam hal pembagian kekayaan merupakan faktor pendorong dicetuskannya otonomi daerah. Dalam perkembangannya, otonomi daerah telah memunculkan isu politik lokal sebagai implikasi dari pelaksanaan otonomi daerah. Ini dapat dilihat dari fenomena menguatnya politik identitas berdasarkan suku, ras dan agama dalam tindakan politik diantara para elit politik lokal serta partai-partai politik utama ditingkat lokal. Calon yang diusulkan untuk menjadi pemimpin daerah banyak yang diberi identitas baru yaitu "Putra Daerah", dengan tidak memperhatikan asal usul atau latar belakang kelas social atau politiknya. Identitas suku yang digambarkan dengan "Putra Daerah" kerap berbaur dengan identitas agama, gender dan politik uang. Hal ini mengakibatkan terjadi ketegangan politik yang dapat berkembang menjadi kekerasan politik. Karena itu peran serta masyarakat secara langsung sangat diperlukan dalam perebutan kekuasaan ditingkat lokal.

Perjuangan politik ditingkat lokal juga harus dimaknai sebagai suatu mata rantai untuk membangun jaringan atau kekuatan bersama diantara

kekuatan lokal yang lainnya dalam upaya untuk memperoleh posisi kekuasaan dan mempunyai bargaining yang kuat ditingkat nasional. Karena itu perjuangan ditingkat lokal harus mengintegrasikan dirinya dalam perjuangan yang lebih besar dengan membangun partisipasi yang berwatak nasional.

Partisipasi aktif dalam masyarakat untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah akan dapat terlaksana apabila tersedia ruang publik yang memadai. Sehingga demokrasi tidak hanya dipahami secara formalitas sebagai wujud kebebasan rakyat untuk menyampaikan aspirasinya, namun demokrasi juga harus direalisasikan. Ruang publik secara politis merupakan wujud pemahaman baru mengenai bentuk kedaulatan rakyat yang diterapkan didalam masyarakat yang semakin kompleks. Menurut Jurgen Habermas ruang publik terbentuk sebagai suatu kondisi komunikasi yang memungkinkan warga untuk membentuk opini dan kehendak bersama.

Kebudayaan politik Indonesia pada dasarnya bersumber pada sikap dan tingkah laku politik yang majemuk. Namun dari sinilah masalah-masalah biasanya bersumber. Karena golongan elit yang mempunyai rasa idealisme yang tinggi. Akan tetapi kadar idealisme yang tinggi itu sering tidak dilandasi oleh pengetahuan yang mantap tentang realita hidup masyarakat. Sedangkan masyarakat yang hidup di dalam realita ini terbentur oleh tembok kenyataan hidup yang berbeda dengan idealisme yang diterapkan oleh golongan elit tersebut. Contohnya, seorang kepala pemerintahan yang mencanangkan program wajib belajar 9 tahun demi

meningkatkan mutu pendidikan, namun pada aplikasinya banyak anak-anak yang berada pada jenjang pendidikan dasar harus putus sekolah dengan berbagai alasan, salah satu alasan adalah tidak memiliki biaya. Hal ini berarti idealisme itu tidak diimplikasikan secara riil ke dalam masyarakat yang terlibat dibawah politiknya.

Idealisme diakui memang penting, tetapi bersikap berlebihan atas idealisme itu akan menciptakan suatu ideologi yang sempit yang biasanya akan menciptakan suatu sikap dan tingkah laku politik yang egois dan mau menang sendiri. Demokrasi biasanya mampu menjadi jalan penengah atas polemik ini. Indonesia sendiri mulai menganut demokrasi ini sejak awal kemerdekaannya yang dicetuskan di dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Demokrasi dianggap merupakan system yang cocok di Indonesia karena kemajemukan masyarakat di Indonesia. Oleh karena itu Demokrasi yang dilakukan dengan musyawarah mufakat berusaha untuk mencapai obyektifitas dalam berbagai bidang khususnya bidang politik. Kondisi obyektif tersebut berperan untuk menciptakan iklim pemerintahan yang kondusif di Indonesia. Walaupun demikian, perilaku politik manusia di Indonesia masih memiliki corak-corak yang menjadikan sulit untuk menerapkan Demokrasi yang murni.

Corak pertama terdapat pada golongan elit strategis, yakni kecenderungan untuk memaksakan subyektifitasme mereka agar menjadi obyektifisme, sikap seperti ini biasanya melahirkan sikap mental yang otoriter/totaliter. Corak kedua terdapat pada anggota masyarakat biasa, corak

ini bersifat emosional-primordial. Kedua corak ini tersintesa sehingga menciptakan suasana politik yang otoriter/totaliter.

Sejauh ini kita sudah mengetahui adanya perbedaan atau kesenjangan antara corak-corak sikap dan tingkah laku politik yang tampak berlaku dalam masyarakat dengan corak sikap dan tingkah laku politik yang dikehendaki oleh Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kita tahu bahwa manusia Indonesia sekarang ini masih belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila itu dalam sikap dan tingkah lakunya sehari-hari. Kenyataan tersebutlah yang hendak kita rubah dengan nilai-nilai idealisme Pancasila, untuk mencapai manusia yang paling mendekati kesempurnaan dalam konteks Pancasila.

Esensi manusia ideal tersebut harus dikaitkan pada konsep "dinamika dalam kestabilan". Arti kata dinamik disini berarti berkembang untuk menjadi lebih baik. Misalnya kepada suatu generasi diwariskan suatu undang-undang, diharapkan dengan dinamika yang ada dalam masyarakat tersebut dapat menjadi Undang-Undang tersebut bersifat luwes dan fleksibel, sehingga tanpa menghilangkan nilai-nilai esensi yang ada, generasi tersebut terus berkembang. Dinamika dan kemerdekaan berpikir tersebut diharapkan mampu untuk memperkokoh persatuan dan memupuk pertumbuhan.

Yang menjadi persoalan kini ialah bagaimana dapat menjadikan individu-individu yang berada di masyarakat Indonesia untuk mempunyai ciri "dinamika dalam kestabilan" yakni menjadi manusia yang ideal yang diinginkan oleh Pancasila. Maka disini diperlukan suatu proses yang

dinamakan sosialisasi Pancasila. Sosialisasi ini jika berjalan progressif dan berhasil maka kita akan mengimplikasi nilai-nilai Pancasila kedalam berbagai bidang kehidupan. Dari penanaman-penanaman nilai ini akan melahirkan kebudayaan-kebudayaan yang berideologikan Pancasila. Proses kelahiran ini akan memakan waktu yang cukup lama, jadi kita tidak bisa mengharap hasil yang instant terjadinya pembudayaan.

Politik lokal di Indonesia menjadi semakin penting dan dinamis dengan diterapkannya otonomi daerah melalui UU nomor 32 tahun 2004 mengenai pemerintah daerah yang memuat ketentuan tentang pemilihan kepala daerah secara langsung. UU ini mulai dijalankan pada bulan Juni pada tahun 2005 yang ditandai dengan pemilihan kepala daerah langsung (Pilkada pertama) di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Fenomena ini memberi gambaran bahwa otonomi daerah dan desentralisasi secara politik merupakan jawaban atas sentralisme politik orde baru, dimana setiap kebijakan yang menyangkut ekonomi dan politik lokal disetir oleh pusat. Pelaksanaan otonomi daerah juga disebut sebagai cara pemerintah pusat untuk menjembatani konflik antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Dasar Penelitian

Penelitian ini merupakan tipe penelitian deskriptif-kualitatif, Bogdan dan Taylor (1975)²⁵ mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Tipe ini digunakan untuk mengetahui peta kekuatan-kekuatan politik dan konflik antar kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007. Dasar penelitian ini adalah studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan tetap memperhatikan aspek efisiensi serta efektifitas guna pencapaian tujuan penelitian.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sulawesi Selatan dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Sebagai daerah yang akan melaksanakan pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur pada bulan November 2007.
2. Untuk pertama kalinya Gubernur/Wakil Gubernur Sulawesi Selatan dipilih secara langsung oleh masyarakat.

²⁵ Bogdan dan Taylor. Dalam Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya Bandung, 1991.

C. Sumber Data

Data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa :

1. *Data Primer*

Data primer dikumpulkan dari narasumber untuk memperoleh pandangan-pandangan berkenaan dengan peta kekuatan-kekuatan politik dan konflik antar kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007. Narasumber dalam penelitian ini berjumlah 6 orang yang terdiri dari Akademisi/Pengamat Politik 3 (tiga) orang dan Praktisi/Pengurus Parpol 3 (tiga) orang. Data primer dikumpulkan melalui wawancara yang dilakukan secara mendalam (*Indepth Interview*)²⁶.

2. *Data Sekunder*

Penelitian ini lebih di fokuskan pada penggunaan data sekunder. Data sekunder yang digunakan yakni :

- a. Bahan hasil pemilu di Sulawesi Selatan yaitu data hasil pemilihan legislatif, data hasil pemilihan Presiden/Wakil Presiden, data hasil pemilihan DPRD Sulsel, dan data hasil pemilihan kepala daerah kabupaten/kota di Sulsel.
- b. Bahan pemberitaan koran harian lokal yaitu Koran Harian Fajar, Koran Harian Tribun Timur, dan koran lokal yang lain.
- c. Bahan lainnya yang dianggap relevan dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

²⁶ Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta. Hal 83

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi teknik wawancara, observasi dan dan dokumentasi.

1. Teknik Wawancara

Teknik ini dipergunakan untuk memperoleh pandangan, penjelasan maupun keterangan dari narasumber secara verbal berupa jawaban-jawaban atas sejumlah pertanyaan yang diajukan dengan dipandu oleh (*interview guide*) yang telah disiapkan sebelumnya dan diarahkan sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Teknik Observasi

Dilakukan dengan cara pengamatan dan pencatatan sistematis mengenai fenomena-fenomena yang berlangsung menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran obyektif mengenai tujuan penelitian yang ingin dicapai.

3. Teknik Dokumentasi

Proses ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif untuk mendapatkan keterangan mengenai pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007 melalui dokumentasi dan berbagai data atau dokumen-dokumen yang ada serta catatan-catatan berkaitan dengan tujuan penelitian. Data dokumentasi akan diperoleh dari berbagai instansi atau lembaga yang terkait dengan tema penelitian.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini akan meliputi kegiatan dilakukan secara bertahap. Pada awalnya seluruh data yang didapatkan dikumpulkan baik yang berupa jawaban verbal dari narasumber maupun yang berupa tulisan atau data-data statistik dan hasil observasi/pengamatan yang berkaitan dengan keberadaan kekuatan-kekuatan politik dan konflik antar kekuatan-kekuatan politik menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007. Selanjutnya dilakukan proses reduksi data yakni merangkum dan memilih data pokok yang akan difokuskan berdasarkan kesamaan data tersebut secara substansi. Proses kategorisasi terhadap data serta pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mencermati setiap fenomena politik yang berlangsung.

Data akan dikategorisasikan berdasarkan polarisasi partai politik atau koalisi partai politik dalam mengusung calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel dan konflik yang terjadi diantara kekuatan politik. Semua data yang telah terhimpun tersebut kemudian dikomparasikan dengan teori pertukaran jaringan dan teori pilihan rasional yang dijadikan perangkat analisis dalam melihat peta kekuatan politik serta menggunakan teori konflik untuk melihat kemungkinan terjadinya konflik antar kekuatan politik. Hal ini dilakukan sebagai acuan untuk mendapatkan realita di lapangan dengan cara mendeskripsikannya. Kesimpulan dalam penelitian ini diambil dengan melihat hasil analisa terhadap temuan data sesuai dengan kenyataan data primer, sekunder serta data hasil observasi.

F. Definisi Operasional

1. Peta Kekuatan-kekuatan Politik Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007

Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2007, para warga masyarakat yang sudah punya hak untuk terlibat di dalam pilkada menjadi sasaran perebutan oleh kekuatan-kekuatan politik seperti partai politik. Partai politik yang bertarung memenangkan pilkada tak punya pilihan lain, selain menciptakan kondisi terbaik dan menarik untuk merebut hati warga masyarakat yang akan memilih.

Dalam pilkada terdapat banyak kekuatan politik yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peta kekuatan politik yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah peta kekuatan partai politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007. Polarisasi partai politik atau koalisi partai politik akan dianalisis dengan menggunakan Teori Pertukaran Jaringan dan Teori Pilihan Rasional.

2. Konflik antar Kekuatan-kekuatan Politik Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007

Konflik terjadi antar kelompok yang memperebutkan hal yang sama, tetapi konflik akan selalu menuju kearah kesepakatan. Konflik mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat,

persaingan, dan pertentangan antar individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, dan antara individu atau kelompok dengan pemerintah. Masing-masing berupaya keras untuk mendapatkan dan mempertahankan sumber yang sama. Namun, guna mendapatkan dan mempertahankan sumber yang sama itu kekerasan bukan satu-satunya cara. Pada umumnya kekerasan cenderung digunakan sebagai alternatif terakhir.

Untuk dapat mengetahui konflik antar kekuatan politik yang terjadi menjelang pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007 digunakan beberapa teori analisis konflik yakni Peter M Blau, Ralf Dahrendorf, dan Clifford Geertz dalam melihat struktur konflik. Sebab dalam persoalan konflik ini perlu diperhatikan konteks struktur dalam kehidupan sosial yang bersangkutan. Tipe struktur kehidupan sosial tertentu sebagai suatu unit entitas akan berpengaruh terhadap konflik yang terjadi di suatu tempat.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Partai Politik dan Kelompok Kepentingan di Sulawesi Selatan

Dalam sejarah perkembangannya, keberadaan partai politik di Sulawesi Selatan tidak lepas dari perjalanan partai politik secara umum di Indonesia yang memang mengalami pasang surut. Ketika dikeluarkannya maklumat pemerintah pada tanggal 3 November 1945 misalnya, yang mana maklumat ini ditandatangani oleh Wakil Presiden Mohammad Hatta atas usul BP-KNIP (Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat) yang meminta agar supaya rakyat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik, maka tidak mengherankan jika pada waktu itu terdapat sebanyak 29 partai politik. Malahan dalam pemilu 1955 (pemilu pertama di Indonesia) diikuti oleh 52 kontestan, meskipun pada akhirnya hanya 27 partai dan satu calon perorangan yang mendapat kursi di DPR.

Hanya saja, oleh karena perkembangan politik di tanah air yang sering diwarnai oleh terjadinya pergolakan politik yang bernuansa SARA dan munculnya ketidakpuasan daerah terhadap pemerintah pusat yang kemudian menciptakan krisis politik di Indonesia dengan meletusnya pemberontakan PRRI-PERMESTA (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia – Perjuangan Semesta) pada tahun 1958, dan ternyata peristiwa ini membawa dampak pula bagi kehidupan sistem kepartaian di Indonesia dan ini terbukti dengan dikeluarkannya Penetapan Presiden NO 7/1959 tentang

politik atau gabungan dari partai politik memiliki suara 15 persen dari total perolehan suara didalam pemilihan anggota DPRD. Selain itu, untuk menjaring calon yang dinilai memiliki kapasitas intelektual dan komitmen moral yang kuat untuk membangun daerah maka mekanisme perekrutan calon harus berlangsung secara demokratis dan transparan seperti diatur dalam Pasal 59 ayat (3) UU 32/2004 tentang pemerintahan daerah.

Pada pemilihan anggota DPRD Sulawesi Selatan tahun 2004, Partai Golkar meraih 33 kursi atau 43,85% dan merupakan perolehan kursi mayoritas. PKS meraih 8 kursi atau 7,10%, PKB 8 kursi 1,75%, PPK 8 kursi, PAN 8 kursi, PPP 7 kursi atau 6,41 %, PDI-P 6 kursi, Partai Demokrat 1 kursi atau 2,64%, PBB 1 kursi atau 2,94 %, Partai Merdeka 1 kursi atau 2,16%, PDS 1 kursi, serta partai-partai non-parlemen lainnya yakni PKP Indonesia 1,54%, PBSB 0,40%, PSI 1,42%, PPNU 0,76%, PNBK 0,63%, PPD 0,87%, PIB 0,64 %, PNI Marhaenisme 0,26 %.

Dominasi Partai Golkar di Provinsi Sulawesi Selatan masih merupakan warisan dari era Soeharto, ketika A.A. Baramuli berhasil memenangkan Golkar di hampir semua provinsi di Indonesia bagian Timur lewat blok IRAMASUKA (Irian, Maluku, Sulawesi, Kalimantan). Di masa transisi dari Soeharto ke B.J. Habibie, yang asal kepresidenannya juga karena diorbitkan oleh Soeharto, Golkar tetap berhasil mempertahankan hegemoninya dalam kepemimpinan politik di Sulawesi Selatan. Selanjutnya, dalam era pasca-Soeharto, kader-kader Golkar dari ketiga poros baru – A (ABRI), B (Birokrasi), dan G (Golkar, dari tiga poros terdahulu, yakni

B. Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007

Dalam tradisi Bugis-Makassar, politik bukanlah sebuah hal baru. Sebab dalam peradaban Bugis-Makassar telah lama dikenal proses politik. Hal ini dapat telusuri bahwa hampir semua kerajaan atau sistem pemerintahan di Bugis dan Makassar dibangun dari adanya perjanjian (kontrak) politik antara kelompok (anang) dalam wilayah permukiman masing-masing (wanua) untuk mengangkat yang dalam istilah lontara disebut dengan to Manurung sebagai pemimpin komunitas. Sehingga dalam tradisi Bugis-Makassar telah terbangun sebuah model demokrasi komunitarian yang spesifik dan telah dilaksanakan secara turun temurun dalam sistem pemerintahan orang Bugis-Makassar di masa lalu.

Dalam tradisi Bugis-Makassar paling tidak ada tiga kriteria pemimpin yang biasa dijadikan sebagai ukuran untuk melihat seorang pemimpin. Pertama, to panrita' (saleh) yaitu penguasaan atas seluk-beluk agama, bijaksana, saleh, dan jujur. Begitu pentingnya moralitas dan kejujuran sehingga sejak awal kearifan Bugis-Makassar menempatkan kejujuran sebagai kriteria seorang pemimpin. Kedua, to acca (cerdas/smart) dalam tradisi Bugis-Makassar, pemimpin haruslah cerdas, smart dan visioner. Hal ini disebabkan karena kecerdasan sangat menentukan keberhasilan seorang pemimpin. Ciri ketiga, adalah to warani (tegas) artinya seorang pemimpin dalam tradisi Bugis-Makassar adalah orang berani, yaitu manusia yang memiliki prinsip. Kesadaran akan ketegasan bermaknakan

Provinsi Sulawesi Selatan terdiri dari 23 Kabupaten/Kota, 291 Kecamatan dan 2.879 Desa/Kelurahan, seperti ditunjukkan dalam tabel berikut ini :

Tabel 1
Rekapitulasi Jumlah Desa / Lembang dan Kelurahan di Sulawesi Selatan
Sampai Dengan Bulan Juni 2006

No	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Kelurahan	Total Desa/Kel	Luas Wilayah
1.	SELAYAR	10	66	7	73	1.357,03
2.	BULUKUMBA	10	99	27	126	1.284,63
3.	BANTAENG	8	46	21	67	395,83
4.	JENEPONTO	10	85	28	113	706,52
5.	TAKALAR	7	54	16	72	566,51
6.	GOWA	18	123	44	167	1.883,32
7.	SINJAI	9	67	13	80	798,96
8.	BONE	27	333	39	372	4.559,00
9.	MAROS	14	80	23	103	1.619,12
10.	PANGKEP	12	65	37	102	1.132,08
11.	BARRU	7	40	14	102	1.132,08
12.	SOPPENG	7	49	21	70	1.174,71
13.	WAJO	14	128	48	176	2.504,6
14.	SIDRAP	11	67	38	105	1.883,23
15.	PINRANG	12	68	36	104	1.961,67
16.	ENREKANG	9	95	16	111	1.784,93
17.	LUWU	18	177	15	192	3.092,58
18.	TATOR	40	223	87	310	3.205,77
19.	LUWU UTARA	11	167	4	171	7.502,58
20.	LUWU TIMUR	11	99	0	99	6.944,88
21.	MAKASSAR	14	0	143	143	199,26
22.	PAREPARE	3	0	21	21	99,33
23.	PALOPO	9	0	48	48	155,19
	Total	291	2131	748	2879	46.368,90

Sumber : www.sulsel.go.id

Data pemilih yang akurat akan menentukan pilkada yang jujur, adil, dan transparan. Dalam pilkada Sulsel, terdapat perbedaan persepsi soal data wajib pemilih antara KPU dengan Desk Pilkada Pemerintah Provinsi Sulsel. Hal ini terjadi karena Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada yang diserahkan oleh biro dekon ke KPU tidak mencantumkan alamat dan usia calon pemilih dan sekitar 71.000 pemilih berpotensi ganda. DP4 yang disusun oleh Desk Pilkada Pemprov Sulsel dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2
Data Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pilkada (DP4) Pemilihan Gubernur / Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007
Disusun oleh Desk Pilkada Pemprov Sulsel

No.	Kabupaten / Kota	Penduduk	%	DP4	%
1	Luwu	334.374	4,4	212.591	4,1
2	Soppeng	219.130	2,8	159.158	3,0
3	Pengkep	289.689	3,8	190.632	3,6
4	Bone	668.193	8,8	435.451	8,4
5	Tana Toraja	419.100	5,5	261.977	5,0
6	Sidrap	240.076	3,1	171.206	3,3
7	Pare-pare	124.489	1,6	76.770	1,4
8	Sinjai	226.227	2,9	150.040	2,8
9	Barru	168.555	2,2	114.727	2,2
10	Maros	294.209	3,8	196.685	3,7
11	Makassar	1.260.286	16,6	928.742	17,9
12	Bulukumba	298.012	3,9	231.222	4,4
13	Gowa	568.825	7,5	384.719	7,4
14	Takalar	261.943	3,4	182.590	3,5
15	Bantaeng	176.324	2,3	129.688	2,5
16	Jeneponto	318.813	4,2	223.204	4,3
17	Luwu Utara	274.858	3,6	177.662	3,4
18	Luwu Timur	235.439	3,1	152.276	2,9
19	Palopo	127.043	1,6	81.880	1,5
20	Selayar	125.000	1,6	76.717	1,4
21	Pinrang	367.349	4,8	249.028	4,8
22	Wajo	392.105	5,1	287.189	5,5
23	Enrekang	169.260	2,2	107.893	2,0
Total		7.559.299	100	5.182.027	100

Sumber : *Tribun Timur 18 Juni 2007*

BAB V PEMBAHASAN

A. Peta Kekuatan Politik Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007

Sejarah perkembangan partai politik di Indonesia sangat mewarnai perkembangan demokrasi di Indonesia. Hal ini sangat mudah dipahami, karena partai politik merupakan gambaran wajah peran rakyat dalam percaturan politik nasional atau dengan kata lain merupakan cerminan tingkat partisipasi politik masyarakat. Berawal dari keinginan untuk merdeka dan mempertahankan kemerdekaan serta mengisi pembangunan, partai politik lahir dari berbagai aspirasi rakyat yang berkeinginan untuk bersatu dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Romantika kehidupan partai politik sejak kemerdekaan, ditandai dengan bermunculannya banyak partai (*multipartai*). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara. Banyaknya alternatif pilihan dan meluasnya ruang gerak partisipasi rakyat memberikan indikasi yang kuat bahwa sistem pemerintahan di tangan rakyat sangat mungkin untuk diwujudkan.

Dalam pelaksanaan pilkada secara langsung apabila dilihat dari aspek normatifnya, keberadaan partai politik memang memainkan peran

yang sangat signifikan untuk menjual seorang calon kepala daerah kepada publik. Ini dapat diamati dalam pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 yang dengan tegas menyebutkan bahwa pasangan calon kepala daerah diajukan oleh parpol atau gabungan parpol. Oleh karena itu, dapat dipahami bahwa peran partai politik sangat menentukan jadi tidaknya seorang calon menjadi kepala daerah. Dan melalui proses politik seperti ini, seringkali dikhawatirkan pula terbuka ruang politik yang lebih luas akan terjadinya oligarki partai yang ditandai dengan dominasinya keputusan elite partai untuk menentukan pasangan calon kepala daerah termasuk didalamnya penentuan calon yang terkesan didrop dari pusat. Dan kalau sekiranya, fenomena oligarki partai tersebut semakin mengeras dalam dinamika politik lokal maka tidak menutup kemungkinan gejala ini dapat menimbulkan penyimpangan demokrasi. Ini sangat logis, karena dalam sebuah negara demokrasi rekrutmen politik bukanlah merupakan domain dari sekelompok kecil orang melainkan membuka peluang untuk mengadakan kompetisi secara sehat karena semua orang mempunyai hak dan peluang sama.

Menjelang pelaksanaan pilkada atau masa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan tahun 2007, para warga masyarakat, yang sudah punya hak untuk terlibat di dalam pilkada, jadi sasaran perebutan oleh kekuatan-kekuatan politik seperti partai politik. Kekuatan-kekuatan politik yang bertarung memenangkan pilkada tak punya pilihan lain, selain menciptakan kondisi terbaik dan menarik untuk merebut hati warga masyarakat yang akan memilih (*voters*). Walaupun baru akan dilaksanakan

pada bulan November, namun pemilihan kepala daerah Sulawesi Selatan sudah menghangat. Pertarungan bakal kandidat makin seru dan tak terelakkan. Pertarungan politik yang dibumbui sentimen kepentingan, ideologi, etnik dan agama menjadi aroma yang menyengat. Di Sulsel, hanya Partai Golkar yang bisa mencalonkan kandidat secara tunggal. Dengan 33 kursi di DPRD Sulsel, Golkar melampaui 15 persen sebagaimana disyaratkan UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Partai lain berkoalisi karena jumlah kursi yang kurang, yaitu PPKD dengan 8 kursi, PAN (8), PKS (8), PPP (7), PDI-P (6), dan lima partai, yaitu PBR, Merdeka, Demokrat, PDS, dan PBB, yang masing-masing mendapatkan satu kursi.

Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel tahun 2007, konstalasi kekuatan partai politik lebih mengarah pada tiga pasangan cagub-cawagub. Partai Golkar yang meraih suara pemilu legislatif 2004 berkisar 43,28 persen, telah menetapkan HM Amin Syam-Mansyur Ramly sebagai cagub-cawagub. Sementara, koalisi PAN, PDK, dan PDIP lebih memilih pasangan Syahrul Yasin Limpo dengan Agus Arifin Nu'mang. Sedang Koalisi Keumatan (PPP dan PKB) dan Kebangsaan (KKK) yang terdiri dari beberapa partai non-parlemen menjagokan Aziz Qahhar Mudzakkar berpasangan dengan Mubyf Handaling. Partai yang tergabung di Koalisi Kebangsaan adalah PSI, Partai Merdeka, PNBK, PKPB, PNI Marhaen, PPNUI, PIB, dan PPD.

Koalisi Keumatan sebelumnya terdiri dari PPP, PKB dan PKS. Namun sejak awal pembentukannya, koalisi parpol hijau ini, memang

disambut dengan rasa pesimisme. Apakah koalisi ini bisa mempertahankan solidaritasnya hingga hari pencoblosan, atau hanya justru menjadi kekuatan politik yang prematur. Hal ini terbukti dengan keluarnya PKS dari koalisi tersebut, padahal ketiga partai ini secara ideologis mempunyai banyak kesamaan. PKS keluar dari koalisi itu dan merapat ke calon Partai Golkar, HM Amin Syam. Akan tetapi dalam perjalanannya kemudian tidak terjadi kesepahaman dan membuat PKS mencari alternatif lain. Hal ini semakin menguatkan dugaan kita bahwa keberadaan partai politik tidak lebih dari keinginan untuk memperoleh kekuasaan.

Teori Pertukaran Jaringan (*network exchange theory*) atau disingkat NET yang dikembangkan oleh Markovsky, Willer dan rekannya mengasumsikan bahwa kekuasaan ditentukan oleh struktur jaringan, khususnya ketersediaan koneksi alternatif di antara aktor. Ide fundamental dibalik teori pertukaran jaringan adalah bahwa setiap pertukaran sosial terjadi dalam konteks jaringan pertukaran sosial yang lebih besar. Apa-apa yang dipertukarkan kurang penting dalam pendekatan ini jika dibandingkan dengan berbagai ukuran, bentuk, dan koneksi dari jaringan dimana pertukaran itu terjadi.

Sebagaimana teori pertukaran sosial, teori pertukaran jaringan terutama menitikberatkan pada pada isu kekuasaan. Premis dasarnya adalah bahwa semakin besar peluang aktor untuk melakukan pertukaran, semakin besar kekuasaan si aktor. Diasumsikan bahwa peluang untuk pertukaran ini secara langsung berkaitan dengan struktur jaringan, aktor akan bervariasi

dalam peluang mereka untuk bertukar keuntungan dan karenanya akan bervariasi dalam kemampuannya untuk mengontrol atau mengakumulasi profit. NET membedakan antara dua tipe jaringan yakni kuat dan lemah yang didasarkan pada apakah aktor dapat dikeluarkan dari pertukaran atau tidak. Jaringan kekuasaan yang kuat meliputi beberapa aktor yang pasti dikeluarkan (aktor kekuasaan rendah) dan aktor lain yang tidak dapat dikeluarkan (aktor kekuasaan tinggi).²⁷

Fenomena pertama yang akan dianalisis dengan menggunakan pendekatan NET ini adalah fenomena persaingan beberapa kader Partai Golkar untuk menjadi Calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel periode 2008/2013 yang diusung oleh Partai Golkar. Syahrul Yasin Limpo dan Agus Arifin Nu'mang yang gagal menjadi calon lewat Golkar dan kemudian mendapatkan dukungan dari partai lain mengindikasikan bahwa keduanya merupakan aktor dengan kekuasaan yang rendah dalam Golkar dibandingkan dengan H Amin Syam yang berhasil menjadi calon yang diusung secara resmi oleh Golkar dan menjadi aktor dengan kekuasaan yang tinggi dalam Golkar itu sendiri.

Keluarnya PKS dari Koalisi Keummatan dan merapat ke pasangan dari Partai Golkar yakni H Amin Syam dan Mansur Ramly merupakan pertanda bahwa partai tersebut kurang mendapatkan pengakomodasian politik secara memadai dan dapat dikatakan berada dalam posisi kekuasaan yang rendah dalam kaitannya dengan keinginan politik yang akan dicapai.

²⁷ Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas. *Op.cit.* Hal 387-389

Selain itu, perpindahan ini sangat dimungkinkan oleh faktor Mansur Ramly yang mempunyai jaringan konektivitas dengan PKS lewat Komisi Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI) Sulsel. Dalam teori pertukaran jaringan dijelaskan bahwa apa-apa yang dipertukarkan kurang penting dalam jika dibandingkan dengan berbagai ukuran, bentuk, dan koneksi dari jaringan dimana pertukaran itu terjadi. Sebab jika Mansur Ramly mempunyai hubungan dengan KPPSI dan KPPSI mempunyai hubungan dengan PKS maka sangat mungkin kalau dikatakan bahwa Mansur Ramly mempunyai hubungan dengan PKS.

Secara umum, dengan menggunakan teori pertukaran jaringan untuk menjelaskan polarisasi partai politik dalam berkoalisi mengusung calon pada pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel dapat dijelaskan bahwa polarisasi tersebut tidak bisa dilepaspisahkan dengan konektivitas jaringan yang telah ada sebelumnya. Dan juga bergantung pada tinggi rendahnya kekuasaan yang dimiliki serta kemungkinan untuk memperoleh keuntungan yang diinginkan. Sebab setiap orang, kelompok bahkan partai politik sekalipun selalu berada pada naluri untuk memperoleh kekuasaan.

Dalam Teori Pilihan Rasional James S Coleman disebutkan bahwa basis minimal untuk sistem sosial tindakan adalah dua orang aktor, masing-masing mengendalikan sumber daya yang menarik perhatian pihak yang lain. Perhatian satu orang terhadap sumber daya yang dikendalikan orang lain itulah yang menyebabkan keduanya terlibat dalam tindakan saling membutuhkan...terlibat dalam tindakan...Selaku aktor yang mempunyai

tujuan, masing-masing bertujuan untuk memaksimalkan perwujudan kepentingannya yang memberikan ciri saling tergantung atau ciri sistemik terhadap tindakan mereka.²⁸

Hal ini menjelaskan bahwa seseorang secara sepihak memindahkan kontrol atas tindakannya kepada orang lain disebabkan keinginan untuk memaksimalkan kepentingan mereka. Biasanya upaya memaksimalkan kepentingan individual itu menyebabkan keseimbangan kontrol antara beberapa aktor dan ini menghasilkan keseimbangan dalam masyarakat. Tetapi dalam kasus perilaku kolektif, karena terjadi pemindahan kontrol secara sepihak, upaya memaksimalkan kepentingan individu tak mesti menyebabkan keseimbangan sistem.

Partai politik dalam melakukan koalisi untuk mengusung calon Gubernur/Wakil Gubernur Sulsel pastilah berangkat dari keinginan memaksimalkan kepentingan mereka. Sebab dalam pembentukan koalisi tersebut selalu diawali dengan kesepakatan-kesepakatan politik yang ingin dicapai. Lihatlah bagaimana tarik ulur dalam menentukan calon Wakil Gubernur Sulsel yang hampir dialami oleh seluruh koalisi yang ada. Bagi para calon Gubernur Sulsel, keberadaan calon Wakil Gubernur merupakan suatu kekuatan yang perlu dipertimbangkan dalam rangka meningkatkan kemungkinan untuk menang.

²⁸ *Ibid.* Hal 391-400

B. Konflik Antar Kekuatan Politik Menjelang Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2007

Fenomena pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung belakangan ini mendapat sorotan tajam sejumlah pihak. Fasalnya, pemilihan ini sedianya diharapkan mewakili sebuah bentuk demokrasi yang paling tinggi — mengingat pelibatan masyarakat secara langsung dalam memilih calon pemimpinnya — tetapi pada kenyataannya tak sedikit yang justru menyisakan konflik yang tidak berkeseduaan. Konflik umumnya dipicu karena persoalan prosedural misalnya penetapan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, perhitungan suara, hingga kepada soal yang cukup substansial seperti menggejalanya fenomena "politik uang", *black campaign*, hingga gejala kekerasan khususnya dalam bentuk pengrusakan fasilitas publik sebagai protes penolakan hasil pilkada tersebut.

Salah satu lagi efek samping pilkada langsung adalah timbulnya konflik lokal yang kemungkinan timbul tidak hanya antara penganut politik aliran, tetapi oleh pertarungan antara "pemuka masyarakat" setempat. Konflik ini akan meningkat pada saat menjelang dan pasca pilkada. Seorang "jago" atau "raja kecil" pada suatu kawasan, akan berebutan pengaruh dan suara pada kawasan yang sama. Mungkin motifnya bukan karena politik uang, tetapi gengsi antara desa, kelurahan, kecamatan atau gengsi eks kerajaan kecil melawan eks kerajaan kecil di kecamatan lain. Hal ini akan memunculkan pertarungan solidaritas garis keturunan, sesama kerabat dan

sesama saudara, seperti yang mulai terjadi di beberapa daerah yang melaksanakan pilkada.

Inilah efek samping pilkada, inilah bentuk "pesta demokrasi" dalam wajah yang baru. Jika zaman otoriter Soekarno dan Soeharto, seorang Gubernur, Bupati/Walikota akan terpilih karena "tangannya sudah digarisi", maka sekarang di zaman reformasi, seorang gubernur/bupati/walikota terpilih memang karena takdir "garis tangannya". Hal ini akan tergantung pada kualitas dan kemampuan mereka untuk menyewa atau merangkul partai-partai, menghimpun suara dengan politik uang, mempengaruhi kerabat dan klein (penggarap sawah, dan sejenisnya) bahkan yang terjelek, penggunaan "preman" lokal, mengancam dan mengintimidasi. Dan ini, bukan hal yang musykil terjadi bagi calon yang sudah terlanjur "keasmaran" dengan kekuasaan di depan pelupuk matanya.

Proses pilkada sendiri tak jarang terjadi konflik horizontal yang bermuara pada ketidakpuasan terhadap hasil akhir pilkada. Dalam beberapa teori konflik dikatakan bahwa perasaan yang diperlakukan secara tidak adil merupakan penyebab timbulnya konflik. Di luar kemungkinan adanya upaya mobilisasi massa dari pihak yang memiliki kepentingan-kepentingan tertentu. Dalam praksis politik demokrasi, konflik atau perbedaan kepentingan, persepsi, interpretasi terhadap mekanisme pilkada sebetulnya tidak saja mengandung nilai-nilai positif pembelajaran politik, melainkan juga merupakan strategi politik yang sering dipraktikkan banyak negara demokratis. Konflik dalam praksis politik sebetulnya tidak mungkin

dihindari, apalagi Indonesia yang memiliki multipartai politik. Intensitas konflik menunjuk pada tingkat pengeluaran energi dan keterlibatan pihak-pihak (kelompok-kelompok) yang berkonflik. Sedangkan kekerasan konflik menyangkut alat/sarana yang digunakan dalam situasi konflik, mulai dari negosiasi hingga saling menyerang secara fisik. Konflik antar kelompok yang menyangkut masalah prinsip dasar (fundamental) akan menimbulkan pertentangan antar kelompok yang lebih serius dibandingkan dengan masalahnya sekedar bersifat sekunder atau dinilai tidak penting.

Peter M Blau menyatakan bahwa struktur sosial adalah penyebaran secara kuantitatif warga komunitas di dalam berbagai posisi sosial yang berbeda dan mempengaruhi hubungan diantara mereka (termasuk didalamnya hubungan konflik). Karakteristik pokok dari struktur yaitu adanya berbagai tingkat ketidaksamaan atau keberagaman antarbagian dan konsolidasi yang timbul dalam kehidupan bersama sehingga mempengaruhi derajat hubungan antarbagian tersebut yang berupa dominasi, eksploitasi, konflik, persaingan, dan kerjasama.²⁹

Selanjutnya Blau mengelompokkan basis parameter perbedaan struktur menjadi dua, yaitu nominal dan gradual. Parameter nominal membagi komunitas menjadi sub-sub bagian atas dasar batas yang cukup jelas seperti agama, ras, jenis kelamin, pekerjaan, marga, tempat kerja, tempat tinggal, afiliasi politik, bahasa, nasionalitas dan sebagainya. Kalau dicermati pengelompokan ini bersifat horizontal dan akan melahirkan

²⁹ Chang, William. *Op.cit.* Hal 8

berbagai golongan. Adapun parameter gradual membagi komunitas kedalam kelompok sosial atas dasar peringkat status yang menciptakan perbedaan kelas seperti pendidikan, pendapatan, kekayaan, prestise, kekuasaan, kewibawaan, inteligensia dan sebagainya. Jadi pengelompokan ini bersifat vertikal, yang akan melahirkan berbagai lapisan.³⁰

Parameter nominal akan terlihat ketika para kandidat yang diajukan oleh koalisi partai politik dalam pilkada Sulsel dipetakan berdasarkan latar belakang etnik seperti Bugis dan Makassar. Misalnya Amin Syam dan Mansyur Ramly dianggap representasi Bugis, demikian juga Azis Qahhar Mudzakkar dan Mubyl Handaling representasi Bugis, sedangkan Syahrul Yasin Limpo yang berpasangan dengan Agus Arifin Nu'mang merupakan kombinasi Makassar-Bugis. Selain itu, pemetaan secara geopolitik dimana para kandidat dilihat berdasarkan asal kedaerahan, Misalnya, Amin Syam dianggap simbol Bone, Soppeng, Wajo (Bosowa), Syahrul Yasin Limpo simbol Selatan-selatan terutama Gowa hingga Bantaeng, Agus Arifin Nu'mang dan Mubyl simbol Ajatappareng, Mansyur Ramly simbol Wija to Luwu dan sekaligus Bone, Azis Qahhar sebagai simbol Wija to Luwu.

Dalam peta geografis, kantong-kantong dua etnik tersebut bisa dipilah, meski sesungguhnya pencampuran dua etnik itu terjadi di seluruh kabupaten. Basis tradisional orang Makassar di bagian selatan, terutama Kota Makassar, Kabupaten Gowa, Takalar, Jeneponto, serta mungkin pula Selayar, dan juga Maros yang campuran. Adapun wilayah orang Bugis di

³⁰ *Ibid.* Hal 6

bagian utara, meliputi Kabupaten Bone, Pangkep, Barru, Sinjai, Wajo, Soppeng, Pinrang, Parepare, juga Bulukumba, serta mungkin pula Enrekang.

Dalam sejarahnya, sejak peralihan dari Orde Lama ke Orde Baru, lima gubernur yang memimpin Sulsel semuanya bisa dikatakan berasal dari Bugis, yaitu Ahmad Lamo (1966-1978), Andi Oddang (1978-1983), A Amiruddin (1983-1993), ZB Palaguna (1993-1998 dan 1998-2003), dan Amin Syam (2003-2008). Kalau mencermati lagi, ternyata yang dominan berasal dari wilayah Bosowa (Bone-Soppeng-Wajo).

Di tengah percaturan penentuan kandidat, para calon juga dipetakan berdasarkan daerah asal sebagai basis dukungannya. Misalnya, Amin Syam dianggap simbol Bone, Soppeng, Wajo (Bosowa), Syahrul Yasin Limpo simbol Selatan-selatan terutama Gowa hingga Bantaeng, Agus Arifin Nu'mang dan Mubyl simbol Ajatappareng, Mansyur Ramly simbol Wija to Luwu dan sekaligus Bone, Azis Qahhar sebagai simbol Wija to Luwu.

Politik identitas yang cenderung digunakan oleh masing-masing kandidat menjelang pilkada Sulsel tersebut berpotensi mengakibatkan konflik. Dari apa yang kita kenal sebagai politik identitas ini telah ada dan riil dalam kehidupan politik masyarakat Sulawesi Selatan saat ini. Inspirasi penggunaan identitas etnik sebagai kekuatan politik ini tidak saja menjadi inspirasi politik semata. Karena saat ini sudah begitu melembaga, maka sepertinya sudah menjadi perspektif bagi penentuan jabatan-jabatan yang lainnya. Lihat saja beberapa proses seleksi penentuan jabatan pada lembaga-lembaga independen yang dibentuk selama ini. Berapa kali kita melihat

aspek kualifikasi yang dicapai dalam seleksi kemudian di utak-atik, diatur dan dirubah kembali hanya untuk sekedar memenuhi kuota keterwakilan kelompok etnik. Dan berapa kali aspek perspektif polarisasi konflik kelompok selalu menjadi titik akhir proses-proses penentuannya. Benarkah ini sebagai upaya membaca keinginan masyarakat bawah, atau hanya sekedar melangsungkan pembenaran terhadap kondisi polarisasi konflik elit kepada apa yang seharusnya terjadi. Hal yang paling penting adalah bukan mengakomodasi peluang mereka untuk menggunakan politik identitas sebagai dampak dari polarisasi konflik selama ini, tetapi bagaimana menekan seminimal mungkin peluang politik identitas itu sendiri.

Power sharing atas nama identitas etnik juga tidak dengan sendirinya menjamin bahwa polarisasi-polarisasi konflik politik tidak akan terjadi, dan bahkan mungkin juga tidak menjamin bahwa mereka yang menggunakan akan banyak mendapat dukungan rakyat. Penulis ambil contoh dengan dua kasus pengalaman pemilihan kepala daerah yang telah lalu di dua kabupaten yang berbeda. Contoh pertama, dalam proses pemilihan kepala daerah di kabupaten A. Mereka juga menggunakan hal yang sama dalam pendekatan menampilkan figur-figur calon kepala daerahnya melalui keterwakilan identitas kelompok mayoritas, konon katanya. Tetapi apa yang telah terjadi. Ketika salah satu pasangan kandidat kalah, toh mereka juga masih dapat melakukan mobilisasi-mobiliasi kelompok yang justru relatif berasal dari satu kelompok identitas etnik tertentu dan hampir saja memecahkan suasana yang ada. Padahal pasangan dari yang kalah ini juga berasal dari kelompok

yang berbeda. Selain peluang yang memungkinkan, karena politik (politisasi) identitas telah menjadi hal yang lumrah bagi para elit-elit, dan dianggap sebagai inspirasi kekuatan politik bagi mereka yang memiliki kuasa atas nama.

Sedangkan parameter gradual akan terlihat ketika para kandidat yang diajukan oleh koalisi partai politik dalam pilkada Sulsel menganggap etnis atau asal daerahnya lebih pantas memimpin Sulsel dibandingkan dengan etnis atau asal daerah yang lain. Hal ini dapat dibenarkan sebab selama ini Sulsel memang selalu dipimpin oleh etnis Bugis sehingga membentuk suatu pembenaran didalam masyarakat bahwa etnis Bugis lebih pantas memimpin Sulsel dibandingkan etnis yang lain. Politik identitas yang cenderung digunakan oleh masing-masing kandidat menjelang pilkada Sulsel seperti ini berpotensi mengakibatkan konflik.

Sebab dalam struktur sosial seperti ini, dapat disebutkan bahwa interaksi antar bagian dalam kehidupan bersama dapat terjadi antar kelompok etnis, baik atas dasar parameter nominal maupun gradual bahkan tidak saja secara internal tetapi dapat juga secara eksternal. Interaksi antar bagian dalam kehidupan sosial atas dasar parameter nominal atau gradual dapat menimbulkan konflik antar individu anggota dari berbagai golongan dan lapisan tadi. Sementara itu, menurut Dahrendorf konflik sosial mempunyai sumber struktural, yakni hubungan kekuasaan yang berlaku dalam struktur organisasi sosial. Dengan kata lain, konflik antar kelompok

dapat dilihat dari sudut keabsahan hubungan sosial yang ada atau dari sudut struktur sosial setempat.³¹

Seperti diungkap Clifford Geertz, masyarakat yang majemuk memang sangat rentan terhadap konflik. Dominasi dari satu pihak terhadap pihak lain sering memunculkan konflik sosial yang cukup tajam, yang pada akhirnya akan memicu rusaknya rasa kebangsaan dan penghargaan terhadap pluralitas masyarakat. Dari sinilah kemudian masyarakat Indonesia sangat rentan terhadap disintegrasi. Dalam hubungan ras antarkelompok yang dominatif, unsur konflik dan perpecahan lebih kentara ketimbang unsur konsensus dan integrasi. Konflik sosial seperti inilah yang pada akhirnya menyeret kita melupakan konsep kemanusiaan dan kebangsaan kita, yaitu bahwa kita bersaudara, satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa, Indonesia.³²

Dampak krusial isu etnik ini begitu berisiko bagi hubungan harmonis antar-etnik. Apalagi karena dari segi wacana isu ini terkadang dihubungkan dengan sketsa sejarah pertarungan antar-kerajaan lokal masa silam. Isu ini pun disertai gugatan lain, bahwa jika selama ini Sulsel selalu diperintah pemimpin wakil etnik Bugis maka untuk kesempatan berikut representasi etnik Makassar diberi kesempatan. Eksploitasi isu etnis ini dapat menjadi ranjau yang rawan di tengah kedangkalan berpikir pelaku politik dan emosi level massa.

³¹ Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa*

Kritik (terjemahan). Yogyakarta : Rajawali. Hal 15

³² Chandra, Robby. 1992. *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta, Kanisius. Hal 10

Menurut Clifford Geertz, solidaritas dalam kelompok primordial menghasilkan fanatisme yakni kesetiaan yang amat kuat kepada kelompok dan anggota-anggota kelompok serta penghormatan yang tinggi terhadap nilai budaya politik. Namun mempermudah terjadinya konflik dengan orang lain diluar kelompok primordial. Bila konflik dengan kelompok lain terjadi, para anggota kelompok primordial akan membela kelompok dan anggota kelompok dengan sepenuh hati bahkan tanpa menghiraukan keselamatan diri sendiri. Teori konflik Geertz menganggap bahwa sumber solidaritas kelompok adalah ikatan-ikatan primordial yang menjadi pererat kelompok primordial bersangkutan. Ikatan primordial melahirkan sentiment primordial dan kesetiaan primordial.³³

Masalah pokok dalam teori Geertz yaitu terjadinya percampuran antara kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial. Percampuran ini tidak diinginkan karena kesetiaan politik dan kesetiaan primordial merupakan dua hal yang berbeda. Kesetiaan politik adalah kesetiaan yang relatif tidak kekal. Kesetiaan terhadap partai politik atau pemimpin politik seharusnya didasarkan pada kinerja (*performance*) yang ditunjukkan oleh mereka, jadi kesetiaan politik bersifat pragmatis. Oleh karena itu demokrasi menginginkan kebebasan berbicara, berpendapat, berserikat dan berkumpul agar setiap warga negara dapat menilai kinerja partai politik dan pemimpin politik secara bebas dan mandiri berdasarkan pendapatnya sendiri tanpa dipaksa oleh orang lain.

³³ Chandra, Robby. *Opcit.* Hal 12

Kesetiaan primordial bersifat alami sehingga sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan. Oleh karena itu setiap anggota mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk membela mati-matian anggota kelompok yang lain karena adanya kepercayaan bahwa anggota mereka tidak bersalah dan perlu dibela dari ancaman orang atau kelompok lain yang ingin menghancurkan kelompok primordial mereka dan nilai-nilai yang mendasari kelompok primordial tersebut. Dalam kesetiaan seperti ini, dukungan pada anggota kelompok dan nilai-nilai kelompok tidak bisa didasarkan atas pertimbangan rasional tetapi lebih pada pertimbangan emosional dan perasaan.

Menjelang pilkada Sulsel November 2007 bahkan pelaksanaan pilkada di berbagai daerah di Indonesia, pemanfaatan kesetiaan primordial begitu nampak. Hal tersebut pada akhirnya akan membentuk budaya politik yang tidak sehat dan cenderung anti perbedaan. Pilkada DKI Jakarta misalnya, salah satu iklan layanan masyarakat dengan begitu antusias menyebut "pilih Fauzy Bowo yang asli Betawi sebab yang lain bukan asli Betawi". Padahal klaim mewakili kelompok entitas seperti ini bukanlah jaminan setelah terpilih nanti menjadikan hidup orang memilih bertambah baik. Cara ini juga dipakai pada Pilpres beberapa waktu yang lalu. Namun yang terjadi adalah sebaliknya, kampung halaman SBY mengalami krisis air bersih dan JK yang dianggap mewakili Sulsel, masyarakat harus mengantri untuk membeli minyak tanah.

Dalam pilkada Sulsel, terlepas dari beberapa pasangan calon yang diusung partai politik atau gabungan partai politik merupakan representatif mewakili latar belakang etnis, agama, dan asal daerah, namun pemanfaatan kesetiaan primordial tetap saja dilakukan. Ini terlihat dari penggunaan bahasa, pilihan warna, maupun visi dan misi yang ingin dicapai seakan menjauhkan masyarakat dari cara berfikir yang rasional yakni melihat figur berdasarkan catatan kinerja yang dimiliki. Percampuran kesetiaan primordial dengan kesetiaan politik seperti ini pada akhirnya akan memicu terjadinya konflik antar etnis.

Ada tiga dampak penting dari penggabungan kesetiaan politik dan kesetiaan primordial, penggabungan tersebut menghasilkan perubahan dalam kesetiaan politik karena kesetiaan politik menjadi fanatik dan tidak bisa berubah. Pemimpin politik yang didukung oleh kesetiaan politik fanatik seperti itu akan mempersulit pengawasan terhadap pemimpin dan membuat sang pemimpin cenderung melakukan tindakan-tindakan politik menurut kegiatan sendiri. Kedua, pencampuradukan kesetiaan politik dengan kesetiaan primordial menyebabkan pencampuradukan isu politik dan isu primordial. Pemilihan kepala daerah adalah semata-mata isu politik. Tetapi dalam pilkada isu politik ini sudah diwarnai dengan isu primordial karena beberapa politisi menyebutkan adanya diskriminasi terhadap etnis atau agama tertentu. Dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel, hal ini ditandai dengan munculnya isu dominasi etnis Bugis dalam jabatan Gubernur selama ini di Sulsel dan membuat beberapa kandidat yang

mengklaim mewakili etnis Makassar, Mandar, dan Toraja menjadikannya sebagai komoditas politik. Ketiga, penggabungan tuntutan politik dengan tuntutan primordial adalah mudahnya dilakukan manipulasi dukungan kelompok primordial oleh para aktor politik untuk kepentingan politik.

Dari gambaran diatas terlihat bahwa konflik politik yang terjadi dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel menghasilkan gangguan terhadap kestabilan politik. Teori konflik Geertz menunjuk kepada kita bahwa konflik politik tersebut disebabkan oleh persoalan yang kompleks mulai dari semakin langkanya sumber daya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup sampai kepada pemanfaatan sentimen primordial untuk kepentingan politik. Gangguan terhadap kestabilan ini adalah sangat serius karena konflik politik cenderung berlangsung dalam waktu yang lama tanpa ada penyelesaian. Ada kecendrungan bahwa konflik politik sulit diselesaikan sehingga cara kekerasan sangat mungkin digunakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2007, konstalasi kekuatan partai politik lebih mengarah pada tiga pasangan cagub-cawagub. Partai Golkar yang meraih suara pemilu legislatif 2004 berkisar 43,28 persen, telah menetapkan HM Amin Syam-Mansyur Ramly sebagai cagub-cawagub. Sementara, koalisi PAN, PDK, dan PDIP lebih memilih pasangan Syahrul Yasin Limpo dengan Agus Arifin Nu'mang. Sedang Koalisi Keumatan (PPP dan PKB) dan Kebangsaan (KKK) yang terdiri dari PSI, Partai Merdeka, PNBK, PKPB, PNI Marhaen, PPNUI, PIB, dan PPD menjagokan Aziz Qahhar Mudzakkar berpasangan dengan Mubyl Handaling.
2. Partai politik atau koalisi partai politik menjelang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel Tahun 2007 dalam usaha memenangkan kandidat yang diusungnya menjadikan kesadaran primordial seperti latar belakang etnis dan asal daerah sebagai komoditas politik. Politik identitas yang cenderung digunakan oleh partai politik atau koalisi partai politik seperti ini berpotensi mengakibatkan konflik sebab kesetiaan primordial bersifat alami sehingga sangat kuat dan tidak mudah tergoyahkan serta membuat setiap anggota mempunyai kecenderungan yang tinggi untuk membelanya mati-matian.

B. Saran

1. Pilkada Sulsel mesti dilihat dalam konteks yang lebih luas. Para kandidat dan tim sukses bukan saja menyusun kalkulasi politik yang strategik, antara lain mengawinkan kekuatan partai, ideologi, etnik, atau juga uang, demi merebut kekuasaan yang lima tahun ke depan, tetapi pilkada harus menjadi babak baru tersemainya demokrasi lokal di Sulsel. Di sisi lain warga agar tidak terkecoh memilih pemimpin yang bersih, berhati nurani, populis, dan menjadi perekat masyarakat.
2. Nilai-nilai budaya yang normatif dan religius yang tercermin dalam sejumlah kearifan lokal masyarakat Sulsel sudah saatnya menjadi pegangan semua elemen. Partai politik yang terlibat dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulsel selayaknya memahami dan mampu mengekspresikan secara politik kearifan lokal tersebut. Bila kearifan lokal dapat diinternalisasikan dengan baik maka pilkada akan berlangsung jujur, damai, dan tanpa kekerasan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Aminah, Siti. *Pilkada : Otonomi Elitis Vs Otonomi Rakyat*. Edisi 21. Tahun VI 2005. Insist Press, Yogyakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2006. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. Cetakan kedua puluh sembilan.
- 1994. *Demokrasi di Indonesia*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Budiman, Hendra. *Menakar Perlawanan Politik Elektoral : Pengalaman Gerakan Rakyat di Bengkulu*. Edisi 21. Tahun VI 2005. Insist Press, Yogyakarta.
- Cholid Narbuko & Abu Achmadi. 2003. *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Chandra, Robby. 1992. *Konflik Dalam Kehidupan Sehari-hari*. Yogyakarta, Kanisius.
- Dahrendorf, Ralf. 1986. *Konflik dan Konflik Dalam Masyarakat Industri Sebuah Analisa Kritik* (terjemahan). Yogyakarta : Rajawali.
- Gaffar, Afan. 2002. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta Cetakan III.
- Kacung Marijan. 2006. *Demokratisasi di Daerah*. Pustaka Eureka, Surabaya.
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Rosda, Bandung. Cetakan Kedua puluh Satu.
- Pontoh, C Husain. 2005. *Menentang Mitos Tentara Rakyat*. Resist Book, Yogyakarta.
- Ritzer, George dan J. Goodman, Douglas. 2004. *Teori Sosiologi Modern*. Kencana, Jakarta.

Suryadi, Budi. 2006. *Kerangka Analisis Sistem Politik Indonesia*. Ircisod, Yogyakarta.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik*. Gransindo, Jakarta.

B. DOKUMEN-DOKUMEN

Hasil Pemilihan Anggota DPRD Sulsel tahun 2004

Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Undang-Undang Dasar 1945 (*Hasil Amandemen Kedua*).

UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

UU No.31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

C. MAJALAH DAN KORAN

Aditjonro, George Junus. *Dinamika Politik dan Modal di Sulawesi*. Dalam IndoPROGRESS 27 Juli 2006.

Chang, William. 2001. *Dimensi Etis Konflik Sosial*. Dalam KOMPAS Rabu 2 Februari 2001.

Haris, Andi. *Pilkada dan Pergulatan Partai Politik*. Dalam Fajar 14 Juli 2007

Suryadi Culla, Adi. 2007. *Politik Aliran dan Pilkada Sulsel*. Dalam Tribun Timur 4 April 2007.

_____ 2007. *Dampak Destruktif Pilkada Sulsel*. Dalam Tribun Timur 15 Mei 2007.

Subhan, SD. *Menakar Pertarungan Politik Pilkada Sulsel*. Dalam KOMPAS 11 Agustus 2006.

Umar, Syarifuddin. 2007. *Netralitas Birokrasi Dalam Pilkada*. Dalam Tribun Timur 10 Juli 2007.